

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Inggris adalah salah satu dari empat negara konstituen dari Kerajaan Britania Raya terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara yang terletak di kawasan di Eropa Utara. Dalam perkembangannya, Inggris adalah salah satu negara paling aktif di kawasan Eropa secara respon-respon kebijakannya, baik untuk urusannya di Eropa ataupun di luar Eropa termasuk untuk kepentingan Uni Eropa.



Gambar 1.1 Anggaran militer Inggris dari tahun 2017-2023

Sumber: *The International Institute for Strategic Studies* (2018; 2019; 2020) (2021; 2022; 2023; *The Military Balance: The Annual Assesment of Global Military Capabilities and Defence Economics*, 2024)

*The International Institute for Strategic Studies* terbitan tahun 2018 sampai 2023 mencatat anggaran pertahanan dari Inggris. Penulis mengkomparasikan dan terlihat pada Gambar 1.1, bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 terdapat peningkatan 44,97 persen atau 22,8 miliar US dolar. Kemampuan

pertahanan yang efektif adalah elemen kunci dari upaya pemerintah untuk memposisikan kembali Inggris sebagai pemimpin global setelah meninggalkan Uni Eropa (Brexit) (Steadman, 2020, p. 2).

Mengutip pada laporannya *Transparency International: Defence & Security* (2020, p. 2), yang mana dokumen ini juga berbasis dari Kantor Luar Negeri, Persemaikan, dan Pembangunan atau dalam versi Indonesianya Kementerian Luar Negeri Inggris, bahwa Inggris berusaha membangun angkatan bersenjata yang lebih maju dan efektif agar mampu beroperasi di arena internasional. Isu ancaman asimetris dan perang hibrida serta ancaman transnasional seperti perubahan iklim, keuangan ilegal, dan terorisme menjadi fokus Inggris. Ini menjadikan Inggris sebagai peran kunci dalam keamanan kawasan Eropa-Atlantik dan Eropa, yang mana ini penting secara keamanan di kawasannya.

Pada kawasan Eropa hingga Amerika Utara terdapat organisasi transatlantik bernama *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang telah berdiri sejak tahun 1949. Saat ini, organisasi tersebut ditujukan untuk keamanan kolektif terhadap ancaman eksternal (Haglund, 2024). Sejak didirikannya NATO, Inggris telah memainkan peran utama di dalam aliansi transatlantik tersebut terutama dalam misi-misi NATO. Salah satunya pernah menjadi kontributor terbesar kedua untuk pasukan *International Security Assistance Force* di Afghanistan tahun 2003 (Ministry of Defence, 2014). Organisasi NATO diketahui seringkali melakukan intervensi kawasan di sekitarnya negara-negara anggotanya. Terbukti bahwa NATO telah melakukan misi keamanan di Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libya, Makedonia Utara, dan kawasan Afrika (NATO, 2023).

Kedekatan Inggris bersama NATO memengaruhi kebijakan luar negeri Inggris di Timur Tengah.

Ratu Inggris Elizabeth II (1952-2022) pernah membahas kepentingan Inggris di kawasan Timur Tengah pada Mei 2010, terutama isu Israel-Palestina (Prime Minister's Office and Her Majesty the Queen, 2010). Mengutip dari laman berita The Jordan Times (2014), Inggris juga terlihat melakukan kesepakatan bersama dengan Bahrain terkait pangkalan permanen untuk Angkatan Laut (AL) Inggris di wilayah Teluk Arab. Keamanan kawasan, khususnya faktor kepentingan navigasi menjadi alasan utama. Kemudian dilanjutkan oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May (2016-2019) pada pertemuannya di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Teluk tahun 2016 di Bahrain. May menyatakan akan menginvestasikan tiga miliar pound sterling untuk keamanan di Teluk Arab. Maka dibukanya fasilitas pangkalan AL Inggris di Bahrain pada tahun 2018 tersebut, menjadikan Inggris memiliki tujuh titik kehadirannya di Samudera Hindia. Ketujuhnya diantaranya adalah Bahrain, Oman, Kenya, Brunei Darussalam, Singapura, Diego Garcia, dan Qatar (Reuters, 2016; Roy-Chaudhury, 2021).

Berbicara soal keamanan, Inggris juga pernah mengerahkan kapal-kapal perangnya kawasan Teluk Arab. Misalnya tahun 2018, fregat HMS Montrose dikirim ke Teluk Persia dan Oman untuk mengawal semua kapal berbendera Inggris. Ini dilakukan atas ketegangan antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Iran terkait penahanan kapal kedua negara tersebut (Haynes, 2019; Utomo, 2019). Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyatakan di depan parlemen Inggris bahwa kebebasan navigasi penting. Mengingat seperlima minyak dunia,

seperempat gas alam cair, dan perdagangan setengah trilun dolar melewati Selat Hormuz tiap tahunnya, maka Hunt juga ingin mengirim kapal tempur lainnya seperti kapal perusak HMS Duncan di Teluk Persia dan Oman untuk memperkuat kawasan (Foreign & Commonwealth Office, Department for Transport, Ministry of Defence, 2019).

Melihat fenomena-fenomena tersebut, dapat diindikasikan bahwa Inggris telah melakukan fokus pada kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Timur Tengah selama empat sampai beberapa tahun belakangan. Kebijakan-kebijakan yang dibahas di Timur Tengah antara lain isu perdamaian kawasan, isu keamanan dan pertahanan kawasan, dan kepentingan Inggris di Teluk Arab. Ternyata pola kebijakan Inggris ini, diperkuat oleh dokumen kebijakan yang dikeluarkan Inggris berjudul *National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 (NSS and SDSR 2015)*. Dokumen ini menjelaskan kebijakan-kebijakan Inggris untuk beberapa tahun ke depan. Inggris melihat bahwa ancaman luar terhadap Inggris semakin kuat. Kebangkitan kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* dan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah menjadikan Inggris harus berfokus di kawasan ini untuk menjaga keamanan, kepentingan, dan kemakmuran Inggris (The Prime Minister & Command of Her Majesty, 2015).

Setelah Inggris melakukan referendum British Exit (Brexit) 2016, akhirnya Inggris secara sepenuhnya meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari 2020 yang kemudian diikuti masa transisi hingga 31 Desember 2020. Jadi, regulasi-regulasi perjanjian internasional, misalnya perjanjian perdagangan bebas dengan negara di luar keanggotaan Uni Eropa, yang telah dijalankan Uni Eropa tidak lagi berlaku

untuk Inggris (BBC, 2021). Ini menjadi kesempatan momen yang tepat bagi Inggris dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru atau melanjutkan secara bebas dan dapat lebih mementingkan kepentingan nasional Inggris sendiri.

Mengutip dari salah satu media di Inggris The Independent (2019), Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson (2017-2019) mengatakan pasca Brexit akan mengirim Kapal Induk HMS Queen Elizabeth bersamaan dengan dua skuadron pesawat tempur F-35 di deknya ke kawasan yang disengketakan di Pasifik. Williamson ingin Inggris tampil lebih keras dalam usaha campur tangannya menghadapi agresi dari Rusia dan Tiongkok dan membangun atau menghidupkan aliansi di kawasan Pasifik. Kemudian pada April 2021, salah satu media di Inggris Sky News (2021) memberitakan bahwa *Carrier Strike Group 2021* (CSG21) akan berlayar untuk memperkuat strategi Inggris yaitu *Global Britain*.

CSG21 ini akan berisikan terutama kapal induk HMS Queen Elizabeth yang akan ditemani oleh beberapa kapal perusak, kapal fregat anti-kapal selam, dan kapal bantu logistik baik dari Inggris sendiri atau sekutu. Mereka akan berlayar selama 28 minggu dan mengunjungi 40 negara dengan 70 kegiatan, termasuk latihan bersama untuk memperingati 50 tahun *Five Power Defence Arrangements* (FDA) dengan Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru (Sky News, 2021).

Hal ini dilakukan Inggris karena ingin mengejar keterlibatan lebih dalam di kawasan ini untuk mendukung kemakmuran dan stabilitas kawasan bersama yang diikuti hubungan diplomatik dan perdagangan yang kuat (British Embassy Tokyo, 2021). Ini diperkuat kembali pada April 2021, tepat saat Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengunjungi Indonesia. Raab menyampaikan bahwa

kawasan Indo-Pasifik akan dijadikan poros utama dalam kebijakan luar negeri Inggris (Maulana, 2021).

Berdasarkan laporan berita oleh Navy Lookout yang berjudul “*Photo essay – the Carrier Strike Group – from the Pacific to the Arabian Sea*” yang diterbitkan pada 1 November 2021. Berita tersebut dikatakan bahwa CSG21 sedang berada di Guam dari 13 September 2021 hingga 27 September 2021 untuk istirahat dan pemeliharaan (Navy Lookout, 2021). Kemudian pada 15 September 2021, secara tiba-tiba Amerika Serikat, Australia, dan Inggris mengumumkan kemitraan trilateral baru bernama AUKUS secara virtual. Ini akan memungkinkan Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir pertama kalinya di kawasan Asia-Pasifik (The White House, 2021; Oktavianto, 2023, pp. 197-198).

Ketiga kepala pemerintahan negara tersebut mengatakan ini bertujuan akan membantu mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik (Prime Minister's Office, 2021). Pada artikel yang diterbitkan oleh BBC (2021), ketiga negara tersebut hadir untuk upaya melawan Tiongkok. Hal tersebut melatarbelakangi oleh respon penolakan cepat oleh Tiongkok yang menyebutnya dengan ‘mentalitas Perang Dingin’ oleh Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat. Diikuti oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dengan respon mengutuk perjanjian tersebut (Liptak & Vazquez, 2021; BBC News, 2021).

Kemudian di tahun 2020, Pemerintah Inggris mengeluarkan larangan penggunaan vendor dari 5G Huawei mulai September dan sepenuhnya dihapus pada akhir 2027. *Telecommunication Security Bill* atau Rancangan Undang-Undang Keamanan Telekomunikasi Inggris mengatur larangan pembelian kit

Huawei 5G baru untuk akhir tahun ini dan persyaratan bahwa kit Huawei harus sepenuhnya dihapus dari jaringan 5G pada akhir 2027 (Hope, 2020).

Pada penelitian ini melihat bagaimana Inggris melakukan perubahan pandangannya mengenai kebijakan luar negerinya. Jika melihat pada dokumen kebijakan Inggris yaitu *NSS and SDSR 2015*, Inggris memang tertarik pada kawasan Asia-Pasifik hanya sebagai mitra keamanan dan kemakmuran serta peluang ekonomi. Namun tidak menyebutkan Tiongkok adalah ancaman atau mengancam kawasan, tetapi menginginkan Tiongkok sebagai mitra ekonominya (The Prime Minister & Command of Her Majesty, 2015). Pada tahun 2021, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyampaikan dalam KTT NATO bahwa meskipun tidak ada niat untuk memulai Perang Dingin baru dengan Tiongkok, terdapat kekhawatiran mengenai tantangan yang dihadapi tatanan internasional akibat tindakan Tiongkok (BBC, 2021).

Gilli (2019, p. 44) menyampaikan, sejak perang di Afghanistan pada tahun 2001 Inggris mulai beralih ke Asia. Peralihan ini berlangsung perlahan selama dua dekade terakhir dan belakangan ini berlangsung cepat karena peningkatan militerisasi Tiongkok dan Brexit. Pasca Brexit, London mengincar kawasan Indo-Pasifik untuk perjanjian perdagangan bebas bilateral dan berminat pada perjanjian multilateral seperti Perjanjian Komprehensif dan progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik.

Melihat hal tersebut, terdapat isu perluasan dan reorientasi kebijakan yang diikuti dengan implementasi dari kebijakan Inggris ke kawasan Asia-Pasifik. Awalnya Inggris terlihat melihat Tiongkok mitra segala bidangnya, sejak tahun

2020-an, Inggris memandang Tiongkok dengan ancaman sistemik. Bahkan Inggris saat ini lebih sering menyebut kawasan Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik, yang mana secara dinamika geopolitiknya lebih kompleks dan terintegrasi antara Samudera Hindia dan Pasifik. *Royal United Services Institute* (RUSI) dan Komite Urusan Luar Negeri Inggris melaporkan tahun 2022 kawasan Timur Tengah terlihat turun dari daftar prioritas oleh Pemerintah Inggris dan London terlihat lebih memprioritaskan kawasan Indo-Pasifik. Laporan ini juga mencatat meski fokus pada Indo-Pasifik meningkat, namun seharusnya tidak mengorbankan kebijakan lamanya di Timur Tengah (Foreign Affairs Committee, 2023; Borck, 2023).

Terjadinya perluasan kebijakan luar negeri Inggris menuju kawasan Indo-Pasifik menimbulkan pertanyaan yang penting untuk diteliti. Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), pemerintah Inggris sedang giat-giatnya melakukan pengembangan dan transisi kebijakan luar negerinya ke kawasan Indo-Pasifik baik secara perdagangan bahkan pertahanan dan keamanan. Tentu ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang pemerintah Inggris melakukan pergeseran ke kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik menurut penulis sangat cepat berubah dan berefek signifikan terhadap tatanan global.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan peryataan masalah di atas, penulis menetapkan serta mengajukan pertanyaan penelitian untuk memfokuskan tulisan penulis sebagai berikut; **“Mengapa Pemerintah Inggris melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya ke kawasan Indo-Pasifik?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan luar negeri Inggris di kawasan Indo-Pasifik dengan memahami dan menghubungkan faktor domestik dan struktur internasional dapat mempengaruhi pergeseran pola kebijakan luar negeri Inggris.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaatnya, antara lain;

1. Memberikan dan menambah pengetahuan, terutama pada studi hubungan internasional di bidang keamanan dan studi kawasan Indo-Pasifik,
2. Membantu dalam menganalisis pola kebijakan luar negeri Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik dengan menggunakan realisme neoklasik,
3. Memberikan wawasan bagaimana pengaruh geopolitik dan kondisi dalam negeri suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini juga memiliki manfaat dari tulisan ini, antara lain;

1. Menjadi informasi tambahan atau baru kepada praktisi atau pemangku kepentingan bagaimana memahami kebijakan luar negeri Inggris di kawasan Indo-Pasifik melalui realisme neoklasik,
2. Menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan di negara-negara kawasan Indo-Pasifik, terutama Indonesia, terkait kebijakan luar negeri Inggris pada kawasan Indo-Pasifik.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menjelaskan konteks dari isu yang akan diteliti, termasuk latar belakang, identifikasi permasalahan dan kepentingan dari penelitian ini, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, tujuan dari penelitian, serta manfaat dari penelitian ini yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu teoritis dan praktis

### BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, terdapat ulasan referensi dari jurnal-jurnal sebelumnya yang memiliki tema atau isu yang sama atau mirip dengan kasus atau masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Bab ini juga mencakup landasan yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti oleh penulis, operasionalisasi konsep serta penjelasan dan penentuan variabel-variabel, dan alur berpikir dalam tulisan ini

### BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini, berisikan metodologi penelitian atau sarana-sarana yang penulis gunakan untuk menjawab masalah kasus yang penulis angkat. Pada bab ini, akan menjelaskan penggunaan paradigma, pendekatan, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan teknik keabsahan dari penelitian ini.

### BAB IV: Pembahasan

Pada bab ini, berisikan analisis dan penyajian data-data yang penulis sampaikan berdasarkan Bab II dan Bab III. Bab ini juga berisikan data-data yang

penulis angkat dan kemudian penulis analisis berdasarkan realisme neoklasik dan konsep perimbangan kekuatan, politik domestik, dan kebijakan luar negeri.

#### BAB V: Penutup

Pada bab ini, berisikan penutup yaitu berupa kesimpulan atau poin-poin utama dari analisis dan penyajian data pada Bab IV.



pendorong dari internal Turki untuk melakukan perpindahan kebijakan luar negeri terkait ekonominya ke Asia (Alagoz, 2021).

Turki belum mengeluarkan strategi komprehensif untuk beralih ke Asia, tetapi ini ditunjukkan dengan implementasi kebijakannya bersama negara-negara Timur Asia. Seperti hubungan ekonomi dan infrastruktur dengan Tiongkok, Jepang, dan kemitraan strategis di bidang perdagangan dan investasi dengan Korea Selatan. Hubungan Turki dengan negara-negara Asia tidak mengorbankan hubungannya dengan Uni Eropa. Uni Eropa tetap menjadi mitra utara di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi hingga masa yang akan datang. Jadi kedekatannya bersama negara-negara Asia adalah untuk mengurangi ketergantungannya dengan pihak Barat. Maka, karakteristik kebijakan luar negeri Turki tidak didorong oleh; faktor geopolitik, netral dalam perselisihan kawasan, tetap setia pada aliansi Barat, dan berfokus pada kepentingan ekonomi (Alagoz, 2021).

Penelitian ini sangat berguna untuk penulis, karena penelitian ini akan membantu penulis dalam mengimplementasikan realisme neoklasik dengan fenomena pergeseran kebijakan luar negeri suatu negara. Walaupun tulisan ini membahas kebijakan luar negeri Turki dan penulis membahas kebijakan luar negeri Inggris, namun tetap sangat relevan karena kesamaan dalam fenomena/kasus yang terjadi dan penggunaan teori yang dibahas pada penelitian ini sama dengan penulis.

Kedua, penelitian karya Alexander Korolev berjudul “*Russia’s Reorientation to Asia: Causes and Strategic Implications*” yang terbit pada tahun 2016. Artikel ini berusaha mengeksplorasi penyebab dan konsekuensi dari kebijakan reorientasi ke Asia oleh Pemerintah Rusia. Artikel ini menggunakan

realisme neoklasik, yang mana tulisan ini akan meneliti faktor sistemik internasional dan domestik Rusia. Selain melakukan analisis dokumen resmi dan survei opini publik Rusia, maka untuk memperkuat data, Korolev juga melakukan wawancara dengan para ahli Rusia dan pejabat pemerintah di Moskow, Vladivostok, dan Irkutsk pada 2014-2015.

Korolev (2016) melihat terjadinya pergeseran baru dalam kebijakan luar negeri Rusia dengan beberapa istilah yang dimaknakan sebuah reorientasi kebijakan luar negeri Rusia. Rusia gagal menjadi bagian dari Barat pasca era Soviet dan sekarang berusaha menjadi kekuatan di Eurasia dengan fokus ke Asia. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan ekspansi NATO menjadi alasan Rusia menyeimbangkan kekuatan. Secara domestik, kebutuhan ekonomi untuk mengembangkan pembagunan wilayah timur Rusia. Melakukan reorientasi ke Asia adalah usaha Rusia untuk mengakhiri kebingungan dan pembentukan identitas baru setelah runtuhnya Uni Soviet serta meningkatkan multipolaritas.

Reorientasi Rusia juga sejalan dengan pandangan geopolitik Tiongkok, kedua negara ini semakin erat hubungannya termasuk kehadiran institusi BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) dan *Shanghai Cooperation Organisation* yang semakin penting. Selain itu, Rusia juga melakukan kerja sama energi, militer, dan infrastruktur bersama Tiongkok serta memperkuat hubungannya bersama Korea Utara (Korolev, 2016).

Penelitian ini sangat berguna juga bagi penulis, karena penelitian ini juga menjelaskan pergeseran kebijakan luar negeri suatu negara ke kawasan lain dan penggunaan realisme neoklasik. Tulisan ini lebih menjelaskan implikasi atau

dampak dari pergeseran Rusia ke Asia terhadap tatanan global. Tulisan dari Korolev ini juga cocok menjadi referensi penelitian terdahulu pada tulisan penulis. Sama halnya seperti tulisan karya sebelumnya, tulisan ini sama-sama menjelaskan realisme kebijakan luar negeri pada fenomena pergeseran kebijakan luar negeri ke suatu kawasan.

*Ketiga*, adalah artikel karya Gerald Damping berjudul “**Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap China dalam Konflik Laut China Selatan**” yang terbit pada tahun 2020. Artikel ini menggunakan konsep internal dan eksternal, dan *realpolitik* dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri mengalami perubahan signifikan pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, yakni tidak meneruskan kebijakan presiden Filipina sebelumnya Benigno Aquino III yang sebelumnya lebih konfrontatif.

Perubahan kebijakan luar negeri Filipina ini didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari peran Presiden Duterte sendiri, kelompok kepentingan, dan pengaruh Senat. Sedangkan faktor eksternal datang dari tekanan dari Tiongkok terkait klaim histori di Laut Tiongkok Selatan serta pengaruh dari sistem internasional yaitu posisi Amerika Serikat melemah dan pemerintahan sebelumnya yang konfrontatif dengan Tiongkok. Menurut Damping (2020), ini dilakukan untuk menjaga kepentingan negara Filipina seperti keamanan dan kesatuan, ekonomi, dan kepentingan nasional Filipina. Dalam hal ini, di masa pemerintahan Duterte memprioritaskan kepentingan ekonomi Filipina misalnya

seperti mengikuti kerja saa pembangunan *Belt and Road Initiative* dengan Tiongkok.

Tulisan ini memiliki persamaan mengenai fokus pembahasannya yaitu perubahan atau pergeseran dan menyinggung isu internal dan eksternal. Perbedaan tulisan ini terletak pada penggunaan konsep dan teori, tulisan Damping (2020) juga lebih berfokus terhadap kebijakannya terhadap suatu negara bukan kawasan. Akan tetapi menurut penulis, ini dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu karena akan membantu penulis dalam skripsi ini.

*Keempat*, adalah tulisan karya Nguyen Thi Thuy Hang yang berjudul “*The US Rebalance towards the Asia-Pacific: Really Realist?*” terbit pada tahun 2016. Dalam menganalisis kasus tersebut, Hang menggunakan realisme sebagai pisau analisisnya. Artikel ini mengkaji mengenai sifat-sifat realisme terhadap penyeimbangan kembali Amerika Serikat ke Asia-Pasifik. Artikel ini menemukan bahwa Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama telah melakukan hal cerdas untuk menyeimbangkan kembali ke kawasan Asia-Pasifik dengan peningkatan kekuatan militer dan aliansinya (Hang, 2016).

Hadirnya militer Amerika Serikat di Asia-Pasifik, tentu ini akan memajukan dan mempertahankan kepentingan serta posisinya di kawasan ini. Tetapi, pemerintah Obama ternyata juga tertarik terhadap lembaga atau insitusi multilateral regional dan mempromosikan nilai-nilai dan memandangnya sebagai dimensi penting dari keterlibatan Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Maka Hang (2016) menilai, ini menyimpang dari kebijakan luar negeri yang realis. Hang juga menilai juga bahwa pemerintah Obama menggunakan varian realisme

Krauthammer yang dicap sebagai realisme demokratis atau globalisme demokratis. Jadi, pemerintahan Obama mengenai perpindahannya ke kawasan Asia-Pasifik adalah karena kebijakan luar negeri realis yang telah dimodifikasi untuk menyesuaikan keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat di abad ke 21.

Persamaan dari tulisan ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai kebijakan pergeseran atau reorientasi melalui kebijakan luar negeri sebuah negara, seperti alasan, faktor-faktornya, dan sebab-akibatnya. Sedangkan secara perbedaan tulisan Hang (2016) dengan tulisan penulis sangat berbeda baik kasus yang diangkat dan penggunaan teorinya. Tetapi ini akan menjadi referensi penulis dalam segi menjelaskan pergeseran kebijakan luar negerinya.

*Kelima*, adalah artikel karya Agus Nilmada Azmi dan Muhammad Meiza Fachri dengan judul “***Keputusan Amerika Serikat dalam Mengambil Kebijakan Re-Pivot to Asia di Kawasan Asia-Pasifik Periode 2021-2022***” yang terbit pada tahun 2024. Artikel ini berfokus pada model pengambilan keputusan *pivot to Asia* oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden setelah sebelumnya di masa pemerintahan Trump lebih ‘menarik diri’ dari kawasan Asia dan mengacu pada ‘*American First*’. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersumber pada data sekunder.

Reorientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat kembali ke arah kawasan Indo-Pasifik telah ada sejak masa pemerintahan Obama melalui strategi *Pivot to Asia*, yang mana ini untuk melawan perimbangan dan ancaman terhadap Tiongkok. Pendirian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan penguatan kerja sama militer di kawasan Indo-Pasifik menjadi perwujudan strategi tersebut. Beralihnya

pemerintahan, yaitu Trump, menjadikan terjadinya perbedaan pandangan mengenai kawasan Indo-Pasifik, bahkan Trump menarik diri dari TPP dan membuka akses hegemoni Tiongkok. Berganti kembali pemerintahan yaitu Biden, saat ini pemerintahannya se-pandangan kembali seperti di masa pemerintahan Obama terkait isu keamanan dan aliansi di kawasan.

Azmi dan Fachri (2024) menemukan bahwa baik pemerintahan Biden dan pemerintahan Obama memiliki faktor pengambilan keputusan yang berkuasa adalah se-sama dari Partai Demokrat. Partai ini lebih condong terhadap pendekatan yang multilateral dibandingkan Trump yang diusung dari Partai Republik yang bilateral dan unilateral. Maka, faktor utama dari pengambilan keputusannya adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif Amerika Serikat dipengaruhi oleh ideologi dan pemikiran partai dalam menetapkan kebijakan yang rasional.

Jika dibandingkan antara artikel Azmi dan Fachri (2024) dengan penelitian penulis, ini sangatlah berbeda. Namun karena artikel ini melihat fenomena yang terjadi adalah perpindahan suatu kebijakan luar negeri ke kawasan tertentu menjadikan artikel ini cocok sebagai referensi penulis. Tulisan ini menggunakan teori pengambilan keputusan untuk menganalisis kebijakan luar negeri kedua era pemerintahan Trump dengan Biden mengenai kawasan Indo-Pasifik.

Maka dari itu, penulis akan memberikan sebuah pembaruan atau *novelty* pada penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya akan dijadikan penulis sebagai referensi penulis dalam penulisan penelitian ini pula. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis memutuskan akan menggunakan realisme neoklasik

yang diikuti dengan konsep perimbangan kekuatan, konsep politik domestik, dan konsep kebijakan luar negeri.

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori/Konsep Penelitian	Hasil Penelitian
1	Emine Akcadag Alagoz	<i>Turkey's own 'pivot to Asia': a neoclassical realist analysis</i>	Realisme Neoklasik	Penelitian ini membahas reorientasi kebijakan luar negeri Turki ke Asia. Penelitian ini menemukan bahwa pergeseran ini didorong oleh faktor-faktor sistemik internasional, seperti pergeseran kekuatan global ke kawasan Asia. Faktor domestic seperti kebijakan pragmatis AKP dan peran komunitas bisnis Turki juga berperang dalam reorientasi ini
2	Alexander Korolev	<i>Russia's Reorientation to Asia: Causes and Strategic Implications</i>	Realisme Neoklasik	Penelitian ini membahas reorientasi kebijakan luar negeri Rusia ke kawasan Asia. Penelitian ini menemukan bahwa pergeseran kebijakan luar

				negeri Rusia ini didorong oleh faktor sistemik, yaitu upaya Rusia menyeimbangkan dominasi unipolar Amerika Serikat. Sedangkan faktor domestik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mengembangkan kawasan Timur Rusia dan pembentukan identitas pasca Soviet. Reorientasi ini selain mencakup kerja sama strategis bersama kekuatan Asia, namun juga penemuan kembali Rusia sebagai kekuatan Eurasia.
3	Gerald Damping	Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap	Konsep internal dan eksternal dan <i>realpolitik</i>	Penelitian ini membahas perubahan kebijakan luar negeri Filipina yang dilakukan oleh Presiden Duterte terhadap Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Filipina ini didorong oleh faktor internal yang datang dari peran Presiden Duterte

		China dalam Konflik Laut China Selatan		sendiri, kelompok kepentingan, dan pengaruh Senat dan faktor eksternal datang dari teknanan dari Tiongkok terkait klaim historinya di Laut Tiongkok Selatan serta pengaruh dari sistem internasional yaitu posisi Amerika Serikat melemah dan pemerintahan sebelumnya yang konfrontatif dengan Tiongkok.
4	Nguyen Thi Thuy Hang	<i>The US Rebalance towards the Asia-Pacific: Really Realist?</i>	Realisme	Penelitian ini meneliti kebijakan <i>rebalance</i> Amerika Serikat terhadap Asia-Pasifik di bawah Pemerintahan Obama, dengan fokus seberapa realis kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan <i>rebalance</i> tersebut memiliki elemen-elemen yang terkandung di dalam realisme, seperti kemampuan militer dan aliansi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa Amerika Serikat

				memerhatikan institusi multilateral dan nilai-nilai demokrasi. Maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan <i>rebalance</i> Amerika Serikat adalah kebijakan yang realis yang dimodifikasi
5	Agus Nilmada Azmi dan Muhammad Meiza Fachri	<i>Keputusan Amerika Serikat dalam Mengambil Kebijakan Re-Pivot to Asia di Kawasan Asia-Pasifik Periode 2021-2022</i>	Pengambilan Keputusan	Penelitian ini berfokus membahas kebijakan <i>Pivot to Asia</i> di masa pemerintahan Biden. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan Biden didorong oleh kecenderungan Partai Demokrat yang lebih menyukai pendekatan multilateral daripada pendekatan bilateral dan unilateral yang diambil oleh Partai Republik. Maka, kebijakan <i>pivot to Asia</i> masa pemerintahan Biden mencerminkan latar belakang ideologi dan pemikiran partai yang berkuasa dalam menentukan kebijakan luar negeri yang rasional.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Realisme Neoklasik

Gideon Rose (1998) pada artikelnya berjudul *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*, Rose mengeklaim realisme neoklasik berusaha menggabungkan dari teori-teori yang dikembangkan dari teori *innenpolitik*, realisme defensif, dan realisme offensif. Menurut Jackson dan Sorensen (2013, p. 150), kaum realis neoklasik memandang teori ini sebagai ‘jalan tengah’ dan kepemimpinan negara beroperasi dan kebijakan internasionalnya diterapkan dalam semua batasannya atau ‘ruang lingkup yang luas’ dari struktur anarki dari hubungan internasional.

Ripsman, Taliaferro, dan Lobell (2016) berpendapat, realisme neoklasik dapat menjelaskan fenomena politik mulai dari pengambilan keputusan krisis jangka pendek, perilaku kebijakan luar negeri, dan pola penyesuaian strategi besar negara individu, hingga hasil sistemik, dan akhirnya hingga evolusi struktur internasional itu sendiri. Menurut Hadfield-Amkhan (2010, p. 41), Realisme neoklasik merupakan pemahaman lebih mendalam mengenai konsisten dan variasi yang mucnul dalam keputusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Satu kombinasi peluang eksternal dan kendala domestik dapat memicu beberapa perubahan taktis, tetapi tetap pada strategis kunci.

Realisme neoklasik adalah pendekatan dalam analisis kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan jalan tengah atau lebih mudahnya faktor sistemik dengan hasil kebijakan luar negeri (variabel dependen) melalui variabel *intervening* atau yang selanjutnya penulis sebut variabel antara. Variabel antara disini lebih kepada

faktor domestik di negara tersebut. Negara mengembangkan kebijakan luar negeri dengan memperhatikan ancaman dan peluang yang muncul dalam sistem internasional. Faktor-faktor tersebut menentukan keputusan negara. Bagaimana negara memandang kebijakan luar negeri mereka bergantung pada kemampuan material yang terkait dengan kekuatan domestik untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri mereka. Namun selain kekuatan domestik, pengaruh dari sistemik harus diterjemahkan melalui faktor-faktor variabel antara di tingkat unit (Abdurrohim, Kumalasari, & Rosy, 2023, p. 16).

Teori	Pandangan terhadap Sistem Internasional	Pandangan terhadap Unit-unit	Logika Kausal
<i>Innenpolitik</i>	Tidak penting	Sangat berbeda <sup>1</sup>	Faktor internal → kebijakan luar negeri
Realisme Defensif	Kadang penting; implikasi anarki berubah-ubah	Sangat berbeda	Insentif sistemik atau faktor internal → kebijakan luar negeri
Realisme Offensif	Sangat penting; anarki adalah Hobbesian <sup>2</sup>	Tidak berbeda <sup>3</sup>	Insentif sistemik → kebijakan luar negeri
Realisme Neoklasik	Penting; anarki tidak jelas	Berbeda <sup>4</sup>	Insentif sistemik (variabel independen) → faktor internal (variabel antara) → kebijakan luar negeri

**Tabel 2. 2** Perbandingan Empat Teori mengenai Kebijakan Luar Negeri

Sumber: (Rose, 1998, p. 154)

<sup>1</sup> Negara-negara sangat berbeda satu sama lain dalam hal karakteristik domestik mereka, seperti struktur politik, ekonomi, dan sosial.

<sup>2</sup> Hobbesian adalah istilah untuk menggambarkan sistem internasional sebagai tempat penuh konflik dan bahaya yang konstan. Pada pandangan realisme sebagai ‘keadaan alam’ yang ditandai oleh ketidakamanan yang terus-menerus, persaingan, dan potensi atau konflik aktual (Williams, 2009).

<sup>3</sup> Negara-negara dianggap serupa atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks tertentu, biasanya dalam hal motivasi atau perilaku mereka dalam sistem internasional.

<sup>4</sup> Terdapat perbedaan yang signifikan antara negara-negara, tetapi tidak sejauh ‘sangat berbeda’. Ini bisa merujuk pada variasi dalam kekuatan atau kapabilitas

Kaum realisme neoklasik berpendapat bahwa kekuatan material<sup>5</sup> relatif menentukan parameter dasar kebijakan luar negeri sebuah negara. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung atau sempurna yang menghubungkan kemampuan material dengan perilaku kebijakan luar negeri. Persepsi pemimpin politik dan elit tentang kekuatan relatif sangat penting, tetapi pemimpin dan elit tidak selalu memiliki kebebasan penuh untuk mengekstrak dan mengarahkan sumber daya nasional. Pada analisis kekuatan juga perlu melihat kekuatan dan struktur negara relatif terhadap masyarakat mereka (Rose, 1998).

Menurut Rose (1998, p. 154) pada Tabel 2.2, realisme neoklasik lahir dari gabungan teori *innenpolitik*, realisme ofensif, dan realisme defensif. Rose melihat, pendekatan paling umum adalah mengasumsikan kebijakan luar negeri memiliki sumber-sumbernya di dalam politik dalam negeri. *Innenpolitik* hanya menekankan faktor domestik pada kebijakan luar negerinya. Jadi, faktor internal suatu negara, termasuk ideologi politik dan ekonomi, karakter nasional, partai politik, atau struktur sosio-ekonomi mempengaruhi cara negara tersebut berperilaku dalam lingkungan internasional. Namun, *innenpolitik* kesulitan menjelaskan mengapa negara dengan sistem domestik serupa sering bertindak berbeda dalam kebijakan luar negerinya. Maka dari itu, beberapa ahli berusaha menghindari masalah ini dengan menerapkan model perilaku negara individu atau hasil internasional (Rose, 1998, pp. 146, 148-149; Eckstein, 2006, p. 73; Smith, 2006, p. 38).

---

<sup>5</sup> Kekuatan material, lebih merujuk kepada sumber daya fisik dan kekuatan yang dimiliki negara. Seperti; mencakup aspek kekuatan militer, ekonomi, teknologi dan sumber daya alam

Selanjutnya, ini menghasilkan kebijakan luar negeri lainnya yaitu neorealisme atau realis struktural. Neorealisme dibagi menjadi dua versi yaitu realisme ofensif milik Mershaimer dan realisme defensifnya Waltz. Keduanya berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional terdiri dari negara yang rasional dan berkeinginan untuk mencapai keamanan (Rose, 1998, p. 149). Kaum realisme ofensif negara berusaha memaksimalkan keamanan dan kekuatan relatif mereka melalui kebijakan luar negeri ekspansionis, dengan tujuan melemahkan penantang potensial. Tujuan akhir dari negara adalah hegemoni. Cara ekspansi negara berbeda-beda tergantung pada geografi dan tradisi militer tiap negara (Lobell, 2002, p. 166).

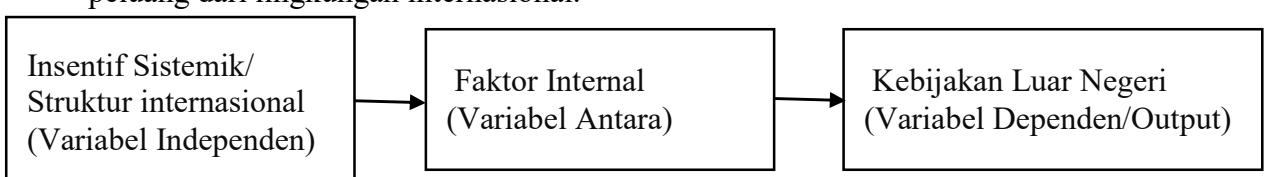
Sedangkan menurut kaum realisme defensif, keamanan melimpah. Maksudnya adalah negara akan berusaha memaksimalkan keamanan mereka dengan mempertahankan perimbangan kekuatan melalui strategi defensif. Kaum ini berpendapat bahwa sistem internasional mendorong negara untuk bertindak moderat dan terkendali demi menjaga keamanan negara tersebut. Kaum ini memandang ekspansi hanya diuntungkan dalam beberapa kasus, karena agresi dan kompetisi bisa memicu dilema keamanan dan menggagalkan upaya peningkatan keamanan serta berpotensi munculnya konflik atau kondisi kritis baru (Lobell, 2010; Rose, 1998, p. 150).

Kaum realis neoklasik menyatakan, kebijakan luar negeri yang baik adalah pertama melihat pengaruh sistem internasional terhadap perilaku nasional. Hal tersebut karena karakteristik paling umum dari negara pada hubungan internasional adalah posisinya relatif dalam sistem internasional. Selain itu, karena pengaruh

faktor struktural seperti kekuatan relatif tidak selalu jelas bahkan bagi aktor politik itu sendiri, maka kaum realis neoklasik perlu berhati-hati bahwa analis yang tidak dimulai dengan mencari pengaruh tersebut mungkin akan salah menafsirkan sebab-akibatnya (Rose, 1998, p. 149).

Rose (1998) menjelaskan, menurutnya *innenpolitik*, realisme defensif, dan realisme ofensif keliru karena mereka tidak memperhitungkan bagaimana kekuatan relatif suatu negara mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Maka dari itu, Rose mengusulkan realisme neoklasik sebagai alternatif yang menggabungkan faktor eksternal dan faktor internal, dengan menekankan bahwa tekanan sistemik harus diterjemahkan melalui variabel antara di tingkat unit, seperti persepsi pembuat kebijakan dan struktur negara domestik.

Sepemikiran dengan Rose, menurut Hadfield-Amkhan (2010) realisme neoklasik berusaha memahami menggabungkan pandangan neorealisme dengan perhatian faktor internal negara. Negara merespon sistem internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor seperti budaya strategis dan persepsi pemimpin. Pada pendekatan ini, para analis dapat memahami karakteristik internal negara mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka sebagai respon terhadap tekanan dan peluang dari lingkungan internasional.



**Gambar 2.1** Logika Berpikir Realisme Neoklasik

Sumber: Diolah dari Rose (1998, p. 154)

Pada Gambar 2.1, merupakan penggambaran untuk memahami alur logika dari pemikiran realisme neoklasik yang menurut penulis masih mirip dengan dari

Rose. Menurut Ripsman, Taliaferro, dan Lobell (2016, pp. 33-35). Kaum realisme neoklasik berpendapat bahwa negara teritorial adalah unit utama pada sistem internasional. Realis neoklasik melihat negara tidak selalu bisa menyesuaikan kebijakan mereka dengan situasi di luar negeri. Ini disebabkan oleh mispersepsi tentang stimulasi dari sistem, proses pengambilan keputusan yang kurang rasional, atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan kegagalan memobilisasi sumber daya manusia. Mereka berpendapat ruang lingkup dan ambisi kebijakan luar negeri negara didorong dalam sistem internasional khususnya oleh kemampuan kekuatan material relatifnya. Pemahaman kaum realis neoklasik berfokus pada negara (terutama kekuatan besar) yang masih menjadi aktor paling berdampak.

Maka, penulis menetapkan untuk varibel independen atau struktur internasional yaitu perubahan situasi yang sedang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Penulis melihatnya dengan adanya faktor eksternal atau luar yang mengimplikasikan Inggris ingin mengintervensi kawasan Indo-Pasifik. Pada kasus ini, penulis melihat faktor perkembangan ekonomi dan keamanan khususnya ancaman Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menjadi faktor utamanya.

Kemudian, variabel independen tersebut direspon melalui variabel antara atau intervensi domestik negara yang mengkondisikan bagaimana negara menanggapi tekanan variabel independen. Faktor-faktor ini digunakan untuk menjelaskan perilaku yang menyimpang dan pilihan kebijakan luar negeri. Variabel ini dapat mempengaruhi respon kebijakan luar negeri suatu negara, terutama di bawah kondisi lingkungan strategis yang terbuka. Variabel antara terdiri politik domestik,

persesi pemimpin, kapasitas ekstraksi negara, struktur negara, dan kekuatan negara untuk menjelaskan perilaku dan pilihan kebijakan luar negeri (Ripsman, Taliaferro, & Lobell, 2016, p. 58). Penulis melihat variabel antaranya adalah politik domestik yang berdimensikan opini publik dan kebutuhan ekonomi pemerintahan Inggris.

Jadi, realisme neoklasik menggunakan variabel antara untuk hubungakan antara variabel independen (sebab) dan variabel dependen (akibat). Variabel antara ini berupa faktor domestik negara tersebut seperti perspektif pemimpin, struktur politik atau kondisi ekonomi. Variabel antara ini berfungsi menjelaskan bagaimana dan mengapa kekuatan relatif suatu negara (variabel independen) mempengaruhi kebijakan luar negerinya (variabel dependen). Variabel antara pada realisme neoklasik ini tidak hanya merespon anomali dalam sistem internasional, tetapi juga menjelaskan bagaimana kekuatan relatif suatu negara ditranslasikan menjadi kebijakan luar negeri melalui proses politik dalam negeri.

Selanjutnya, variabel dependen (hasil) merupakan ‘akibat’ setelah variabel independen diproses dan dipersepsikan oleh variabel antara, lalu kemudian keluarlah kebijakan luar negerinya (variabel dependen). Kebijakan luar negeri tersebutlah yang selanjutnya digunakan negara tersebut untuk mengarahkan kepentingan dan keamanan nasional negara, tujuan ideologis negara, kemakmuran ekonomi, dan interaksi antar negara.

## 2.3 Landasan Konseptual

### 2.3.1 Perimbangan Kekuatan

Perimbangan kekuatan (*balance of power*) merupakan salah satu ide yang berpengaruh dalam studi hubungan internasional. Daya tarik mengenai konsep ini terus berlanjut dan di bahas karena sebagai pusat sistem. Konsep ini telah hadir sejak abad ke-17, ini dibuktikan pada tulisan Jackson dan Sorensen (2013, p. 153). Tepatnya pada masa Raja Perancis Louis XIV untuk mendominasi Eropa, tetapi kekuatan-kekuatan besar Eropa di masanya bersatu menyeimbangi kekuatan Kerajaan Perancis dan berhasil menghentikan dominasinya di masanya (Wohlforth, Kaufman, & Little, 2007, p. 1; Nexon, 2009).

Sebagian besar negara yakin bahwa pembentukan aliansi dapat mencegah kekuatan dominasi yang lebih besar, ini termasuk dalam konsep perimbangan kekuatan. Kaum ini menilai, negara-negara yang tergabung dalam aliansi dimaksudkan untuk melindungi diri dari negara atau koalisi dengan sumber dayanya yang lebih kuat. Pada konsep perimbangan kekuatan menurut Walt (1987, p. 18), ini tergantung bagaimana negara memilih mitra aliansinya yang dapat diidentifikasi. Apakah negara bersekutu untuk melawan ancaman kekuatan utama (*balancing*) atau bersama ancaman kekuatan utama untuk menghindari konfrontasi langsung dari ancaman kekuatan (*bandwagoning*). Berikut merupakan motif bagaimana jika negara melakukan perimbangan kekuatan dengan menyeimbangkan (*balancing*) menurut Walt (1987, pp. 18-19);

*Pertama*, negara mempertaruhkan kelangsungan hidupnya jika tidak menghentikan calon hegemon sebelum terlalu kuat. Bersekutu dengan kekuatan

dominan berarti bergantung pada kebaikan hati mereka. Strategi yang aman adalah bergabung dengan pihak yang tidak bisa dengan mudah mendominasi sekutu mereka, untuk menghindari dominasi. *Kedua*, bergabung dengan pihak yang lebih lemah untuk meningkatkan pengaruh anggota baru pada aliansi. Hal ini dimaksudkan karena pihak yang lemah lebih membutuhkan bantuan. Sebaliknya, bersekutu dengan pihak yang lebih kuat memberikan pengaruh yang lebih sedikit kepada anggota baru dan membuat mereka rentan terhadap kehendak mitra yang lebih kuat. Maka, bergabung dengan pihak yang lebih lemah adalah pilihan terbaik.

Selanjutnya penulis juga memperlihatkan istilah *bandwagoning* menurut Walt (1987, pp. 19-20), ini populer dikalangan negarawan dan pada saat ancaman keamanan negara tengah terjadi. Pada hipotesis *bandwagoning*, terdapat dua alasan negara melakukan perimbangan kekuatan. *Pertama*, *bandwagoning* mungkin merupakan bentuk peredaan. Jadi negara bersekutu dengan negara atau aliansi yang tengah naik daun untuk menghindari/mengalihkan serangan. *Kedua*, negara bersekutu dengan pihak dominan selama berperang dengan maksud mendapatkan bagian kemenangan/wilayah.

Jadi secara singkatnya, menyeimbangkan (*balancing*) adalah penyelarasan bersama pihak yang lemah sedangkan *bandwagoning* penyelarasan bersama pihak yang lebih kuat. Selanjutnya, bagaimana negara-negara memilih diantara kedua hipotesis tersebut ini bergantung pada respon ancaman yang diterima. Seperti faktor kekuatan agregat, kedekatan geografis, kekuatan ofensif, dan niat agresif, seperti yang dijelaskan Walt (1987) pada bukunya.

Di sisi lain, Waltz (1979, p. 118) melihat terdapat dua tujuan atau faktor sebuah negara melakukan penyeimbangan kekuasaan. *Pertama*, upaya internal (langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan ekonomi, meningkatkan kekuatan militer, dan mengembangkan strategi yang cerdas). *Kedua*, upaya eksternal (langkah-langkah untuk memperkuat dan memperbesar aliansi atau melemahkan dan menyusutkan pihak yang berlawanan).

Menurut penulis sendiri kedua pemikiran antara Walt dengan Waltz terkait konsep perimbangan kekuatan ini terkait dalam penelitian yang penulis angkat ini. Jika melihat pada konsep perimbangan kekuatan menurut Walt (1987), Inggris berusaha menyeimbangkan (*balancing*) kawasan Indo-Pasifik dengan menggandeng bersekutu dengan kekuatan dominan, yaitu Amerika Serikat. Ini dilakukan agar mencegah Tiongkok sebagai calon hegemon yang semakin kuat secara keamanan dan militerisasinya dan itu membahayakan keamanan di kawasan Indo-Pasifik termasuk mengganggu kepentingan Inggris di Indo-Pasifik.

Selanjutnya mengacu pada pemikiran Waltz (1979), maka menurut penulis untuk faktor internalnya dengan meningkatkan kapabilitas militernya, seperti melalui pengembangan teknologi militer. Selain itu Inggris juga memperkuat kemampuan ekonominya dengan menjalin kerja sama ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya untuk faktor eksternalnya, Inggris membentuk aliansi seperti AUKUS. Hal ini untuk memperkuat posisi strategisnya di Indo-Pasifik dan memperkuat keberadaan serta hubungan diplomasinya dengan negara-negara kunci di kawasan ini.

### 2.3.2 Politik Domestik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, realisme neoklasik ini merupakan gabungan dari teori-teori lain misalnya seperti *Innenpolitik* yang menekankan faktor domestik pada kebijakan luar negeri. *Innenpolitik* berpandangan bahwa faktor internal seperti ideologi politik dan ekonomi, karakter nasional, politik partisan, atau struktur sosial ekonomi menentukan bagaimana negara berperilaku terhadap sistem internasional. Pendekatan yang paling umum untuk memahami kebijakan luar negeri adalah perlunya memahami politik dalam negerinya pula, yang mana ini sesuai dalam realisme neoklasik. Kebijakan luar negeri yang sebatas memahami faktor sistemik sering kali tidak akurat. Maka, diperlukan analisis bagaimana tekanan sistemik diterjemahkan melalui variabel antara, yaitu persepsi pengambilan keputusan dan struktur negara domestik (Rose, 1998, pp. 148, 152). Menurut tulisan Zakaria pada Brown et al (1995), menjelaskan bahwa sebagian besar negara melakukan kebijakan luar negeri mereka untuk alasan strategis sebagai akibat dari tekanan dan dorongan internasional, bukan untuk tujuan domestik.

Politik domestik merupakan bagian terpenting dalam menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Fearon (1998, p. 290), para sarjana politik akan bertanya-tanya apa yang akan menjelaskan kebijakan luar negeri jika bukan dari politik dalam negeri itu sendiri. Politik domestik, akan menjelaskan kebijakan luar negeri menurut keputusan di dalam negaranya. Dinamika politik domestik digunakan sebagai penjelasan kebijakan luar negeri yang menekankan agen-agen dalam negeri sebagai alat bertahan hidup negara dalam pembuatan keputusan.

Dalam konteks ini, kebutuhan dan aspirasi yang muncul di ranah domestik menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Masithoh, 2018).

Politik domestik lebih merujuk pada faktor-faktor dalam negeri terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Foyle dan Belle (2010), faktor-faktor tersebut terdiri dari opini publik, media, bahkan perdagangan. Baylis, Smith, dan Owens (2014, p. 377) juga menambahkan faktor-faktor lainnya, seperti faktor kepentingan birokrasi, organisasi militer, para pemimpin politik dan koalisi, serta identitas dan budaya negara juga berpengaruh dalam politik domestik. Hal ini dilakukan untuk mengejar keuntungan negara.

Politik domestik dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara dengan dua cara dasar: (a) menyebabkan negara mengambil kebijakan yang kurang optimal, atau (b) ketikaperbedaan dalam institusi politik, budaya, struktur ekonomi, atau tujuan kepemimpinan negara tidak terkait dengan kekuatan relatif dan relevan secara kausal dalam menjelaskan pilihan kebijakan luar negeri yang berbeda (Fearon, 1998, p. 302). Pada penelitian Rohrlich (1987), menjelaskan bahwa politik domestik dengan melalui pendekatan *realpolitik* bahwa ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, misalnya untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan negara.

Pada penelitian Baum dan Potter (2008, pp. 40-41) berpendapat bahwa media memengaruhi hampir setiap aspek hubungan antara opini publik dan kebijakan luar negeri. Keduanya juga memetakan bagaimana hubungan antara media massa, opini publik, dan kebijakan luar negeri. Menurutnya bahwa media memengaruhi opini publik, opini publik memengaruhi media dan memengaruhi pengambilan keputusan,

pengambilan keputusan memengaruhi opini publik, media, dan peristiwa, kebijakan luar negeri memengaruhi opini publik, dan media memengaruhi kebijakan luar negeri. Penulis menilai bahwa artinya opini publik atau pandangan masyarakat dapat mewakili bagaimana kondisi internalnya dapat memengaruhi pola kebijakan luar negerinya.

Selanjutnya pada penelitian Al-masaeed, dkk (2021, pp. 33-34) menyatakan pada dunia bisnis, hubungan internasional berperan besar dalam peningkatan kolaborasi pada kegiatan bisnis. Kerja sama perdagangan internasional antar negara memiliki kepentingan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan perdagangan antar negara mengarah kepada hubungan internasional yang lebih baik. Maka selain melihat secara opini publik, penulis juga akan melihat secara kerja sama perdagangan Inggris dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

Pada penelitian ini, penulis akan lebih berfokus kepada bagaimana respon masyarakat atau pejabat-pejabat Inggris terkait kawasan Indo-Pasifik. Penulis akan meneliti dengan menggunakan sumber dari pihak ketiga, yaitu melihatnya melalui survei-survei yang dilakukan oleh suatu lembaga bereputasi. Penulis juga akan menilai perdagangan Inggris ke kawasan Indo-Pasifik dan kerja sama-kerja sama yang dilakukan pemerintah Inggris ke kawasan tersebut juga.

### **2.3.3 Kebijakan Luar Negeri**

Teori hubungan internasional saat ini memiliki paradoks. Meskipun politik domestik dan pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam teori ini, tetapi seringkali aspek-aspek tersebut diabaikan. Beberapa teori hubungan internasional

seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme telah mencoba memasukkan faktor-faktor ini. Namun, masih banyak teori lainnya yang mengabaikan penelitian bagaimana politik domestik dan pengambilan keputusan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Jadi walaupun politik domestik dan pengambilan keputusan itu penting dan sering muncul dalam teori, namun pada kenyataannya, banyak teori yang seolah-olah mengabaikan aspek-aspek tersebut (Kaarbo, 2015).

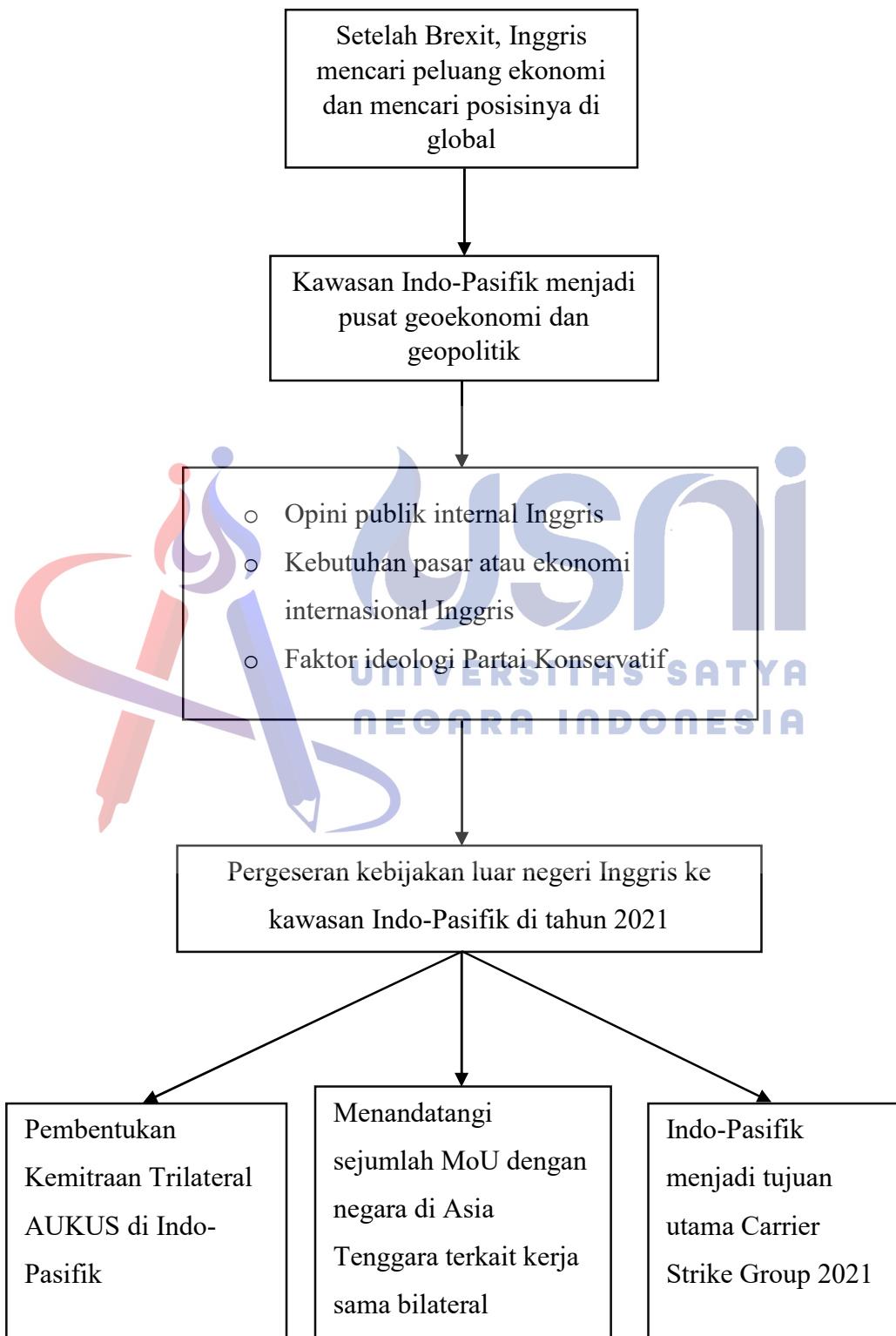
Kebijakan luar negeri menjadi salah satu bidang terpenting dari ilmu hubungan internasional dan telah sangat berkembang karena aspek-aspeknya telah meluas dari ilmu sosial sampai disiplin ilmu lainnya seperti ilmu komunikasi. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, biasanya ditujukan untuk mempengaruhi pihak lain di luar negeri. Namun, terkadang keputusan yang dibuat untuk mempengaruhi pihak dalam negeri berdampak pada pihak luar negeri. Setiap keputusan kebijakan luar negeri dimaksudkan untuk mencapai tujuannya, tetapi sukses total jarang terjadi. Ada berbagai tingkatan pencapaian, mulai dari yang paling berhasil hingga tidak sengaja memicu reaksi yang berlawanan dengan yang dimaksudkan (Setiawan & Sulastri, 2017, p. 1; Hudson & Day, 2020, pp. 4-5).

Analisis kebijakan luar negeri memandang penjelasan mengenai pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sebagai sesuatu yang melibatkan banyak faktor. Kebijakan luar negeri mencoba melihat variabel dari lebih dari satu tingkat analisis, baik tingkat mikro dan makro. Kebijakan luar negeri juga menghargai wawasan dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi, perilaku internasional, antropologi, ekonomi, dan lainnya. Disiplin ilmu tersebut digunakan analis

kebijakan luar negeri untuk menjelaskan faktor-faktor atau alasan dari kebijakan sebuah negara (Hudson & Day, 2020, p. 6).

Dalam konteks studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara berbagai faktor determinan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal mencakup, namun tidak terbatas pada, nilai-nilai budaya dan sejarah yang unik bagi setiap bangsa, struktur pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan, serta pandangan masyarakat dan media terhadap isu-isu luar negeri. Di sisi lain, faktor-faktor eksternal melibatkan dinamika sistem internasional, norma-norma dan aturan yang ditetapkan oleh hukum internasional, kerjasama antarnegara yang difasilitasi oleh berbagai organisasi internasional, kesepakatan kerjasama dalam bentuk Aliansi, dan kapabilitas militer suatu negara. Semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi bagaimana suatu negara merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negerinya (Listiarani, 2020, pp. 21-22). Penggunaan konsep kebijakan luar negeri ini, akan membantu penulis menganalisis kebijakan luar negeri dari Inggris tersebut sembari menganalisis dengan realisme neoklasik.

## 2.4 Alur Pemikiran



**Gambar 2. 2** Alur Pemikiran

Berdasarkan alur pemikiran pada Gambar 2.1 di atas, dapat diidentifikasi aspek-aspek yang akan menjadi fokus dan arahan dalam penelitian ini. Dimulai dari *Pertama*, Inggris melakukan Brexit dengan referendumnya di tahun 2016 kemudian resmi keluar dari keanggotaan Uni Eropa pada 2020. Inggris saat ini menjadi negara yang independen dan membutuhkan posisi dan potensi baru. *Kedua*, kawasan Indo-Pasifik semakin kuat pengaruh pertumbuhan ekonomi global yang diikuti pula dengan pertumbuhan geopolitik di kawasan ini. *Ketiga*, Variabel antara atau internal Inggris seperti opini publik, faktor ideologi partai, dan kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian internal Inggris merespon adanya variable independen (faktor eksternal) tersebut. Variabel antara ini bekerja sebagai jembatan penghubung antara tekanan atau faktor sistemik dengan variabel dependen.

*Keempat*, variabel dependen ini dimaknakan sebagai hasil atau output dari kebijakan luar negeri suatu negara. Pada kasus ini, variabel dependen muncul akibat dipengaruhi variabel independen yang memengaruhi variabel antara. Variabel dependen ini adalah pergeseran kebijakan luar negeri Inggris ke kawasan Indo-Pasifik di tahun 2021 dengan keluarnya dokumen kebijakan *Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy*. *Kelima*, adalah implementasi-implementasi dari pergeseran kebijakan luar negeri Inggris, yaitu dibuktikan dalam bentuk implementasi-implementasi kebijakan luar negeri Inggris ke kawasan Indo-Pasifik seperti pengiriman CSG21 ke Indo-Pasifik, memperkuat keamanan di kawasan (bergabung dengan AUKUS), dan mengikuti sebagian besar kerja sama ekonomi di kawasan ini.

## 2.5 Operasionalisasi Konsep

**Tabel 2. 3:** Operasionalisasi Konsep

Variabel		Dimensi	Indikator
Variabel Independen	Perimbangan kekuatan	Faktor persaingan di Indo-Pasifik	Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pasifik Ancaman Tiongkok terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik
		Kapabilitas militer di Indo-Pasifik	Peningkatan sistem pertahanan dan teknologi negara kawasan
			Kerja sama keamanan multilateral/bilateral di kawasan
Variabel Antara	Politik domestik	Opini internal Inggris	Opini masyarakat dan pejabat terkait kawasan Kebebasan perpolitikan Inggris pasca Brexit
			Pengaruh ideologi Partai Konservatif
		Perekonomian	Kepentingan ekonomi Inggris
Variabel Dependen	Kebijakan luar negeri	Instrumen negara	Komitmen menjaga stabilitas di Indo-Pasifik
			Strategi di Indo-Pasifik

Realisme neoklasik menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel untuk menjelaskan proses atau hasil kebijakan suatu negara, yaitu variabel independen (faktor eksternal atau teknana sistemik), variabel antara (faktor internal), dan variabel dependen (output kebijakan). Pada variabel independen penulis menggunakan konsep perimbangan kekuatan dengan berdimensikan faktor

persaingan di Indo-Pasifik dan kapabilitas militer di kawasan. Kemudian, variabel antara memanfaatkan konsep politik domestik yang akan berdimensikan opini internal Inggris dengan perekonomian internal Inggris. Terakhir, variabel dependen yaitu memanfaatkan konsep kebijakan luar negeri untuk melihat dimensi instrumen negara dari Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik.

## 2.6 Argumen Utama

Tulisan ini menjelaskan bahwa Inggris melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Indo-Pasifik antara tahun 2021-2023. Pada konteks ini, realisme neoklasik dengan penggunaan konsep perimbangan kekuatan, politik domestik dan kebijakan luar negeri berperan penting. Penelitian ini menemukan jawaban bahwa reorientasi dari kebijakan luar negeri Inggris mencerminkan rangsangan dari domestik Inggris yang kemudian meresponnya menjadi suatu kebijakan baru di kawasan Indo-Pasifik.

Domestik Inggris yang dimaksud sendiri adalah faktor opini publik yang mana masyarakat Inggris menganggap kawasan Pasifik dan Asia penting terutama dalam segi perdagangan dan perekonomian. Domestik Inggris di sini terjadi karena adanya pengaruh dan respon yang datang dari tekanan sistemik yaitu geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya faktor ideologi Partai Konservatif, yang mana partai ini menekankan poin-poin utama yaitu hubungan yang aliansi yang kuat bersama Amerika Serikat dan mementingkan militernya untuk kepentingan nasional Inggris. Terakhir, faktor kebebasan pemerintah Inggris pasca melakukan Brexit, yang mana seluruh kebijakan-kebijakan luar negeri Inggris saat ini tidak lagi

diatur oleh Uni Eropa dan independen. Pemerintah Inggris sendiri menekankan strategi *Global Britain*, yang mana ini dimaknakan sebagai keinginan pemerintah Inggris untuk aktif kembali dunia internasional setelah absen pasca Perang Dunia II.

Kemudian, ini menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan baru salah satunya munculnya dokumen kebijakan *Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy*. Salah satu fokus dari kebijakan tersebut adalah ketertarikan Pemerintah Inggris untuk mencari keuntungan dan menjaga stabilitas kawasan termasuk menjaga jalur perdagangannya di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa implementasi Seperti melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia termasuk ASEAN, mengirimkan *Carrier Strike Group 2021* ke Indo-Pasifik untuk memperkuat posisi Inggris di kawasan, dan melakukan pembentukan kemitraan trilateral AUKUS bersama Amerika Serikat dan Australia di kawasan Indo-Pasifik.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Paradigma Penelitian**

Kata paradigma diperkenalkan oleh Thomas Kuhn, lalu dipopulerkan oleh Robert Friedrichs. Menurut Ritzer pada Murdiyanto (2020, p. 1), paradigma sebagai pandangan dasar ilmuan tentang apa yang seharusnya menjadi fokus studi dalam suatu disiplin atau cabang ilmu pengetahuan. Sebagai kerangka berpikir, paradigma penelitian memandu penulis dalam memahami dan mengartikan realitas sosial. Kerangka berpikir juga sebagai alat yang membantu penulis memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena sosial, dan memberikan pedoman bagaimana memperlakukan dan ilmu pengetahuan.

Paradigma penelitian penting dalam aspek ilmu sosial. Menurut Pahux pada Rosika dan Fitrisia (2023, p. 2465), menekankan pentingnya paradigma penelitian untuk memahami masalah dan menentukan kriteria pengujian untuk menjawab masalah penelitian. Kemunculan paradigma, diakibatkan dalam melihat sebuah fenomena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Pada tulisan ini, penulis menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme adalah salah satu dari beberapa paradigma lainnya yang memberikan pengaruh dalam ilmu pengetahuan. Menurut Yuhertiana, paradigma positivis memiliki tiga asumsi dasar, yaitu; ontologi; epistemologi dan; aksiologi. Paradigma positivisme adalah paradigma yang terstruktur untuk menggabungkan logika deduktif dan pengamatan empiris dari perilaku individu, yang berguna untuk menemukan informasi mengenai hubungan sebab-akibat secara probabilistik yang

dapat digunakan pola umum aktivitas manusia. Positivisme melihat fenomena sosial sebagai sesuatu yang dapat diamati dan diverifikasi secara ilmiah. Menurut pandangan positivis, manusia adalah makhluk rasional yang perilakunya diatur oleh hukum-hukum sosial (Rosika & Fitrisia, 2023, p. 2465; Anwar, 2018, p. 24; Zakiah & Putri, 2022).

Pada konteks penelitian ini, pendekatan paradigma positivisme dapat digunakan untuk mengumpulkan data empiris mengenai peristiwa yang penulis angkat serta menganalisisnya menggunakan metode ilmiah untuk mencari sebab-akibat. Lalu pada konteks penggunaan perspektif realisme neoklasik pada studi kasus perubahan kebijakan luar negeri Inggris ke Indo-Pasifik, perspektif ini digunakan untuk melihat kepentingan Inggris baik secara domestik atau internasional dalam kepentingannya di Indo-Pasifik berdasarkan perspektif teori tersebut.

Pada paradigma positivisme, penulis meyakini bahwa hanya ada satu realitas yang dapat diketahui dan dipahami pada kasus yang penulis angkat. Pada studi kasus ini, penulis berpadangan bahwa faktor-faktor domestik dan struktur internasional mempengaruhi Inggris melakukan transformasi kebijakan luar negerinya ke Indo-Pasifik. Jadi dengan penggabungan paradigma penelitian positivisme dan realisme neoklasik, diharapkan penulis dapat melakukan analisis lebih mendalam dan berbasis data-data dengan realitas.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memiliki sejarah panjang dalam ilmu sosial, kesehatan, dan humaniora. Penelitian kualitatif merupakan respon terhadap tradisi dari paradigma positivism dan postpositivisme yang berusaha mengkaji budaya yang sifatnya interpretatif. Jadi kaum kualitatif meragukan paradigma positivis yang berfokus pada realitas empiris untuk mengeksplorasi makna abstrak. Sebagai responnya, kaum ini mengembangkan perspektif dan metode ini untuk memahami isu-isu sosial (Murdiyanto, 2020, p. 18).

Menurut Creswell pada Murdiyanto (2020, p. 19), pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan isu manusia. Peneliti dalam pendekatan ini menciptakan gambaran detail, memahami kata-kata, membuat laporan mendalam dari perspektif responden, dan melakukan penelitian dalam situasi nyata. Menurut Taylor dan Bogdan pada Hendarso (2022), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian.

Pada penelitian kualitatif, penulis perlu memahami informasi yang terjadi dan diterima serta mepertanyakan masalah kasus tersebut karena penelitian kualitatif mengedepankan kualitas. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena untuk memperjelas informasi mengenai transformasi kebijakan Inggris ke kawasan Indo-Pasifik, padahal teritorial Inggris sendiri jauh dari kawasan Indo-Pasifik. Informasi tersebut mengandalkan data-data yang telah diteliti sebelumnya

pada artikel jurnal terdahulu, termasuk menggunakan dokumen resmi, berita, dan/atau laporan data pihak dari ketiga.

### 3.3 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ialah suatu penelitian yang dirancang untuk menjelaskan fenomena tertentu melalui analisis hubungan sebab-akibat antara variabel. Ini dilakukan dengan menguji hipotesis (Zikriadi, Sulaiman, & Hifza, 2023, p. 43). Penelitian eksplanatif digunakan untuk mencari sebab-akibat pada penelitian ini. Berdasarkan penggunaan realisme neoklasik, maka menurut penulis penggunaan jenis penelitian eksplanatif ini sangat tepat untuk digunakan.

Jadi, pada penelitian ini penulis berfokus pada aspek penjabaran dan diharapkan sesuai dengan substansi yang penulis angkat. Pada penelitian ini, peneliti menentukan variabel independen adalah faktor struktur internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Inggris, yaitu dengan melihat berdasarkan konsep perimbangan kekuatan. Sedangkan variabel antara melihat kepada faktor-faktor domestik negara Inggris yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Inggris. Lalu terakhir variabel dependen, yaitu hasil setelah variabel independen direspon oleh variable antara kemudian membuat sebuah variabel dependen atau kebijakan luar negeri.

Pasca kemunculan komitmen Inggris pada kebijakan *Integrated Review 2021*, penulis menduga adanya rangsangan dari struktur internasional (variabel independen) yang mana ini direspon pula oleh faktor peran domestik (variabel

dependen) dari internal negara Inggris yang saling terkait pada peristiwa perubahan fokus Inggris ke Indo-Pasifik. Maka dari itu, penulis ingin meneliti penelitian ini pada faktor peran domestik dan peran struktur internasional yang mempengaruhi perubahan fokus kebijakan luar negeri Inggris ke Indo-Pasifik.

### 3.4 Level Analisis

Menurut Olivia (2013, p. 896), level analisis adalah unit (individu, negara, atau system) yang menjadi fokus dari sebuah teori. Menurut Waltz dan Singer pada Olivia (2013, p. 898), level analisis berguna sebagai faktor penjelasan sedangkan menurut Singer target analisis yang mana peneliti memperoleh gambaran, penjelasan, dan perkiraan mengenai perilaku negara. Maka, level analisis ini membantu penulis dalam penulisan penelitian ini untuk menemukan variabel-variabel yang sangat menentukan tindakan aktor.

Menurut Olivia (2013, pp. 898-899), terdapat tiga level analisis dalam menjelaskan kebijakan aktor negara. *Pertama, system-level analysis*, merupakan pendekatan paling luas dalam studi hubungan internasional yang berfokus pada pola perilaku antarnegara dan ketergantungan mereka. Pendekatan ini melihat bagaimana distribusi kekuasaan di antara negara-negara besar mempengaruhi negara lain. *Kedua, state-level analysis* atau level analisis negara berfokus pada faktor internal suatu negara yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Ini melibatkan pemahaman tentang peran berbagai aktor domestik, seperti birokrasi atau kelompok berkepentingan, dalam pembuatan kebijakan. Analisis ini memberikan penjelasan yang lebih spesifik daripada analisis sistem, tapi lebih

umum daripada analisis individu. Ketiga, *individual-level analysis* atau analisis individu menekankan pada peran manusia dalam pengambilan keputusan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat manusia dan perilaku organisasi. Pendekatan ini memerhatikan bagaimana karakteristik unik individu mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Jadi menurut penulis level analisis penelitian ini ini peneliti fokus pada level analisis negara dan level analisis sistem internasionalnya. Hal ini sesuai dengan variabel-variabel penulis dimana ada faktor domestik dan faktor struktur internasional. Maka penulis melihat partai politik yang menaungi para perdana menteri, sangat mempengaruhi output dari kebijakan luar negeri Inggris. Penulis melihat London berusaha menyeimbangkan kekuatannya di Indo-Pasifik untuk menahan potensi ancaman dari Tiongkok dan melakukan kepentingan persahabatan dengan negara persemakmuran atau mitranya di negara-negara sekitaran Indo-Pasifik.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif keaslian data sangat dipengaruhi oleh sumber dan metode pengumpulan informasi. Sumber informasi, yang juga merupakan subjek penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang sedang penulis teliti dan memberikan data terkait konteks dan situasi yang sedang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan analisis literatur sebagai cara untuk menghimpun data. Pada metode ini, data dikumpulkan melalui penelaahan literatur yang relevan termasuk studi tentang kemampuan pemecahan masalah dan

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada masalah (Adzahra, 2021; Murdiyanto, 2020, p. 52).

### 3.5.1 Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau *Library Research*. Studi kepustakaan adalah studi yang fungsikan untuk mengumpulkan informasi-informasi dan data-data yang ada dalam perpustakaan, seperti dokumen, buku, sejarah, dan lain-lain. Studi kepustakaan memperlajari juga referensi dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diangkat. Selain itu, pendekatan ini juga berguna untuk pengumpulan data melalui cara penelaahan terhadap referensi-referensi yang terkait (Mirzaqon & Purwoko, 2017).

Menurut Nurjanah dan Mukarromah (2021, pp. 68-69), data yang digunakan sebagai referensi berasal dari sumber pustaka yang relevan dan sebagai sumber data primer seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang sumber data sekunder terdiri atas buku, dokumen pemerintahan, dan dasar hukum pemerintah, dan lain sebagainya. Banyaknya referensi-referensi informasi yang penulis temukan, penulis hanya akan mengambil informasi dari jurnal-jurnal ilmiah terkait, berita internasional dari internet yang terpercaya, lembaga-lembaga think tank yang memiliki statistik non-partisan yang terpercaya dan banyak digunakan oleh jurnal-jurnal internasional, dan website pemerintahan Inggris atau gov.uk.

Maka, berikut adalah dokumen-dokumen utama yang menjadi rujukan penulis dalam tulisan ini, yaitu;

1. Dokumen kebijakan Inggris tahun 2021 “*Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy*”,
2. Dokumen kebijakan Inggris tahun 2015 “*National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure and Prosperous United Kingdom*”,
3. Laporan Think Tank dari Pew Research Centre berjudul “*How Global Public Opinion of China Has Shifted in the Xi Era*” tahun 2022,
4. Laporan Think Tank dari Central European Institute of Asian Studies berjudul “*British public opinion on China in the age of COVID-19: Worsening perceptions amidst the pandemic*” tahun 2020,
5. Laporan Think Tank dari British Foreign Policy Group berjudul “*UK Public Opinion on Foreign Policy and Global Affairs: Annual Survey – 2021*”
6. Sebagian besar informasi seperti dokumen kebijakan, siaran pers, dan publikasi penting lainnya yang dipublikasikan oleh <https://www.gov.uk/>.
7. Sebagian besar informasi tanya-jawab pada level antar partai opisisi kepada lembaga terkait di pemerintah Inggris di <https://questions-statements.parliament.uk/>.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data paling umum dalam penelitian kualitatif. Pada wawancara ini, digunakan seorang peneliti atau

penelitian untuk mengendalikan arah pembicaraan untuk mengetahui perasaan, pandangan, dan perspektif dari orang-orang yang diwawancara. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak memungkinkan untuk didapat dengan alat lain atau faktor lainnya. Wawancara adalah alat untuk memverifikasi informasi yang telah diperoleh. Penulis berusaha untuk mengumpulkan data wawancara primer (Rachmawati, 2007, p. 35; Murdiyanto, 2020, p. 60).

Maka dari itu, untuk memenuhi melengkapi kebutuhan dan memperkuat data pada penelitian ini, penulis memetakan melakukan wawancara. Penulis mengkategorikan informan atau narasumber. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang memahami kajian fokus studi kawasan Eropa dan dapat dikaitkan dengan studi kawasan Indo-Pasifik. Seperti;

1. Ibu Dr. Sophiana Widiastutie, M.Si. selaku Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Wawancara Widiastutie telah dilakukan pada 31 Januari 2025 melalui pesan WhatsApp.
2. Ibu Prof. Evi Fitriani, M.A., Ph.D. selaku selaku guru besar Departemen Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Wawancara telah dilakukan pada 7 Februari 2025 melalui Zoom.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memahami dan membahas data untuk menemukan makna dan merumuskan kesimpulan. Ini melibatkan pengaturan, pemilihan, dan pengelolaan data menjadi susunan yang sistematis dan bermakna. Proses ini mengubah tumpukan informasi dan fakta menjadi format yang teratur dan mudah dipahami. Ini juga mencakup penjelasan data, perbandingan, pemberian kode, diskusi dengan teori dan konsep ilmiah, serta interpretasi data untuk memberikan pemahaman (Haryoko, Bahartiar, & Arwadi, 2020, p. 193).

Analisis data adalah penataan dan pengelompokan data ke dalam berbagai pola, kategori, dan unit deskripsi dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data. Analisis data kualitatif adalah proses analisis yang bertujuan mencapai kesimpulan penelitian. Proses ini melibatkan kerja dengan data, mengatur data, membagi menjadi unit data yang dapat dikelola, mesintesisnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan alasannya, serta apa yang telah dipelajari dan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain atau umum. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah kegiatan mereduksi data, mempresentasikan data, dan memverifikasi data untuk ditarik kesimpulan (Haryoko, Bahartiar, & Arwadi, 2020, pp. 194-195).

Tujuan dari data ini adalah untuk memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dan menjelaskannya secara mendalam. Pada penelitian kualitatif, ada beberapa metode analisis data yang tersedia. Penulis menerapkan beberapa tahapan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul.

### 3.6.1 *Flow Chart Analysis*

*Flow chart analysis* atau analisis data mengalir adalah salah satu teknik analisis data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman pada Samsu (2017, p. 105), berpendapat bahwa aliran data melibatkan tiga proses utama, yaitu reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Secara prinsipnya, analisis data ini berlangsung sepanjang proses penelitian dan proses yang terpenting mencakup reduksi atau penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan (*verification/conclusion*).

Reduksi data merujuk pada proses seleksi, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul di lapangan. Ini merupakan bagian integral dari analisis. Reduksi data digunakan untuk membuang data tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir. Ini adalah bagian terpenting dalam penelitian dan berkontribusi pada validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Selain reduksi data, penyajian data juga penting (Samsu, 2017, p. 106).

Penyajian data adalah upaya menyusun informasi yang telah direduksi dengan tujuan untuk menggambarkan kesimpulan dan melakukan tindakan. Biasanya, penampilan data kualitatif dilakukan dalam bentuk narasi teks. Jika reduksi adalah bagian integral dari analisis, maka penyajian data adalah analisis itu sendiri. Penyajian data adalah upaya peneliti menggambarkan dan menginterpretasikan dari data yang diperoleh agar mudah dipahami pembaca

(seperti grafik, tabel, dan lain-lain). Terakhir adalah menarik/penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan merumuskan kesimpulan penelitian, yaitu hasil-hasil temuan tersebut disimpulkan semua data terkumpul (Samsu, 2017, pp. 106-107).

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Pada bagian pengujian data, ini diperlukan untuk menentukan seberapa relevansi suatu data yang disajikan untuk menemukan suatu solusi atau pengetahuan dari masalah yang dipertanyakan. Menurut Mekarisce (2020, p. 145), teknik validasi data adalah elemen penting dalam penelitian kualitatif. Teknik ini mencakup uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, tringulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, kecukupan referensi, dan *member check*), Uji Transferabilitas, Uji Dependabilitas, dan Uji Konfirmabilitas.

Tulisan ini menggunakan teknik keabsahan uji kredibilitas dengan menggunakan bahan referensi. Bahan referensi adalah pendukung untuk melakukan pembuktian-pembuktian data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Pembuktian tersebut seperti data-data dari hasil wawancara termasuk bukti-buktinya seperti foto saat wawancara dan rekaman wawancara (Mekarisce, 2020, p. 150). Menurut (Abidin & Bashori), data yang disajikan harus didukung dengan tampilan foto dan dokumen lainnya yang sejalan. Hal ini agar tingkat kepercayaan pembaca terhadap data yang disajikan akan lebih baik dan terpercaya asal data tersebut.

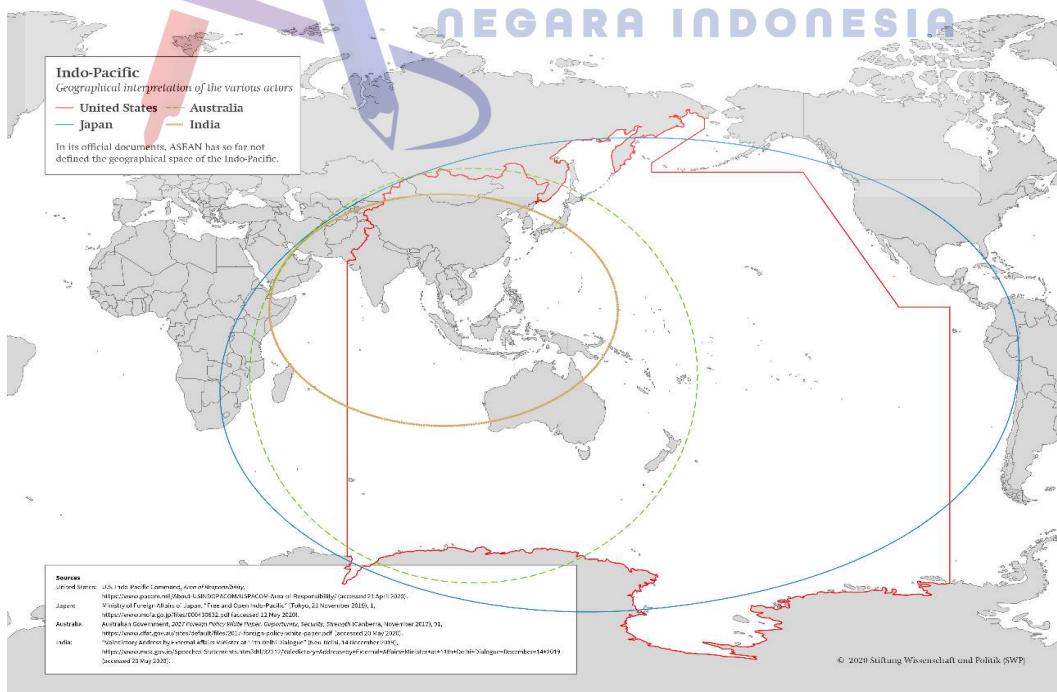
## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Dinamika Kawasan Indo-Pasifik

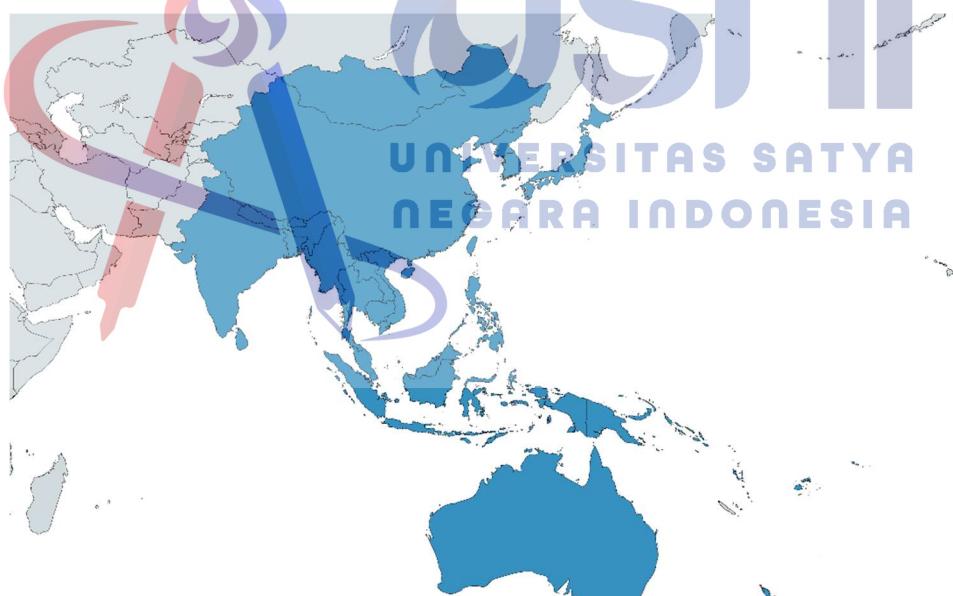
Kawasan Indo-Pasifik adalah tempat tinggal sekitar dua pertiga dari populasi global. Kawasan ini memiliki keterikatan sebagai kawasan jalur perdagangan internasional, geokonomi, geopolitik, kerangka kerja sama regional, perubahan iklim, pertumbuhan militer yang pesat, pembajakan/perompakan, bahkan potensi konflik yang diakibatkan sengketa maritim. Kawasan ini terletak melingkupi kawasan Samudra Hindia, Samudra Pasifik Barat, Samudra Pasifik Tengah, dan Perairan Laut Tiongkok baik sisi Selatan dan Timur (Yadav, 2022, pp. 1, 7; Pedrason, 2021, p. 89; Oktavianto, 2023, p. 168; Pant & Milford, 2021, p. 3).



**Gambar 4. 1 Peta kawasan Indo-Pasifik menurut penggambaran Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India (anggota Quad)**

Sumber: Heiduk dan Wacker (2020)

Menurut Saputro, et al (2024, p. 11) Indo-Pasifik merupakan perluasan istilah dari Asia-Pasifik. Asia-Pasifik sendiri mencakup wilayah Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Lingkar Pasifik. Setelah konsep Asia-Pasifik diubah menjadi konsep Indo-Pasifik, negara-negara sepanjang pesisir utara Samudera Hindia juga termasuk di dalam konsep ini. Secara geopolitik, maka istilah Indo-Pasifik merupakan gabungan dari wilayah Samudera Hindia dan wilayah Pasifik Barat. Pada Gambar 4.1 di atas, merupakan gambaran atau pemetaan mengenai kawasan Indo-Pasifik oleh Amerika Serikat, India, Australia, dan Jepang. Penciptaan istilah Indo-Pasifik ini sejalan dengan kebangkitan dan agresifitas kebijakan luar negeri Tingkok (Deb & Wilson, 2021, p. 111).



**Gambar 4. 2 Gambaran cakupan geografis konsep kawasan Indo-Pasifik menurut parlemen pemerintah Inggris**

Sumber: diolah dari data Parlemen Inggris (2022)

Pada adu argumen antara kedua kubu partai, Anne-Marie Trevelyan dari Partai Konservatif dan Sarah Champion dari Partai Buruh yang difasilitasi oleh Parlemen Inggris (2022) pada Gambar 4. 2. Champion bertanya kepada Menteri Luar Negeri, Persemaikan, dan Pembangunan Inggris mengenai definisi

kawasan Indo-Pasifik. Trevelyan selaku Menteri Negara Urusan Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menyatakan bahwa tanggungjawab bagian Menteri Negara Urusan Indo-Pasifik terdiri dari India dan Samudra Hindia (Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, dan Sri Lanka), Asia Timur Laut (Hong Kong, Jepang, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan), Asia Tenggara (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam) dan Oseania (Australia, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Selandia Baru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu). Hal tersebut menandakan bahwa kawasan-kawasan tersebut merupakan definisi kawasan Indo-Pasifik oleh Pemerintah Inggris.

Pada abad ke-21, kawasan ini menjadi area kerja sama internasional yang diawali dengan kebangkitan Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia (Heiduk & Wacker, 2020, p. 5). Yadav (2022, p. 10) menyampaikan kawasan Indo-Pasifik juga menjadi panggung untuk saling menunjukkan kekuatan, persaingan, dan kekuasaan. Ini juga memberikan kesempatan bagi negara-negara besar di luar kawasan untuk merespon ancaman keamanan atau peluang ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini karena, Tiongkok juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat di kawasan Indo-Pasifik untuk memperluas pengaruhnya di kawasan.

Bisa dibilang, konsep Indo-Pasifik ini bukan hal yang baru untuk lima tahun ini. Hal ini diperkuat oleh Evi Fitriani selaku Guru Besar Departemen Ilmu

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Fitriani menambahkan bahwa:

“Kalau Indo-Pasifik sih melihat lebih banyak geopolitiknya ya. Karena konsep Indo-Pasifik ini sendirikan sebetulnya *newly conceptualize* dengan *minding* yang baru gitu. Dulu sudah ada konsep ini. Tapi kayanya ngga terlalu geopolitik gitu. Tapi sekarang ini, dengan adanya eh strategi Indo-Pasifik dari Quad, justru jadi keliatannya jadi sangat politik dan keamanannya lebih kuat ketimbang ekonominya yah. Eh.. terutama itu ketika Quad mencetus *Indo-Pasifik Strategy*.... ya, memang itu dipicu awalnya dengan hubungan ekonomi China, tapi justru karena China berkembang secara ekonomi dia punya kemampuan kekuatan untuk mengembangkan militer, dan itu yang menakutkan, amat menakutkan...” (Fitriani, 2025).

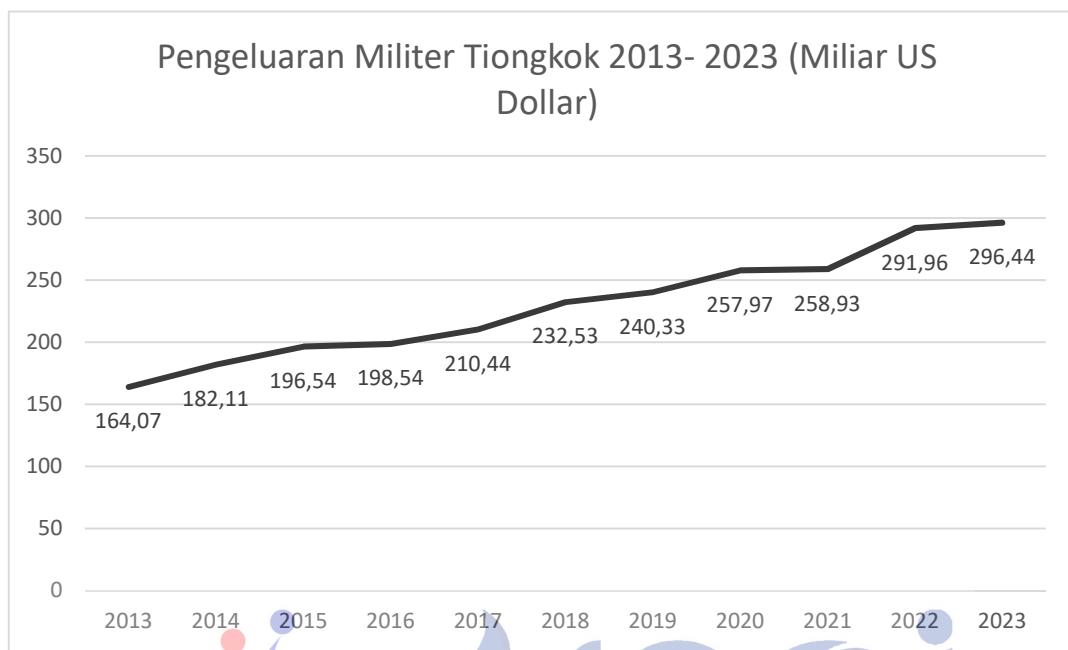
Fitriani dalam (2025) lebih menjelaskan bahwa Konsep Indo-Pasifik ini memang merupakan konsep yang lama namun saat itu pendangan mengenai geopolitik belum sekuat lima tahun belakangan ini. Konsep Indo-Pasifik saat ini menjadi pandangan geopolitik sejak kehadiran Quad. Kehadiran Quad ini mengimplikasikan kawasan ini menjadi lebih dipandang secara geopolitiknya.

Tiongkok memiliki strategi kebijakan ekspansi *soft power* geoekonominya, yaitu kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI), yang digunakannya sebagai alat mengejar kepentingan pembangunan dan menjaga investasinya untuk persiapan menghadapi ancaman-ancaman dari Barat (Li, 2020, pp. 169,178). Oktavianto (2023, pp. 193-194) mencatat, pertumbuhan rata-rata PDB tahunan Tiongkok dari tahun 1979 sampai tahun 2010 mencapai 9,91 persen. Mengutip dari *macrotrends.net* (n.d.), Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok pada tahun 2020 adalah 14,68 miliar US dolar. Pada tahun selanjutnya meningkat sebesar 21,33 persen dan di tahun 2022 kembali meningkat sebesar 0,8 persen. Ini berarti, pada per-tahun 2022 mencapai angka 17,96 miliar US dolar (Macrotrends LLC, n.d.).

Kebangkitan ekonomi yang terjadi pada Tiongkok ini membawa berkah terhadap kawasan ini Indo-Pasifik. Prakash, et al pada lembaga ERIA Research

Project (2022, p. 7) menyatakan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) diperkirakan bahwa 15 negara anggota kawasan ini menyumbang 26,3 triliun US Dolar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) global. Jika India ditambahkan, maka ini akan menyumbang sepertiga PDB global. Ekonomi besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris tertarik pada kemitraan Indo-Pasifik untuk berbagi dinamika ekonomi kawasan ini melalui fasilitas produksi, pasar, dan sumber daya manusia yang besar. Indo-Pasifik muncul sebagai komponen plurilateral ekonomi internasional, bukan sebagai blok.

Kebangkitan ekonomi Tiongkok nyatanya juga memengaruhi di bidang militer. Modernisasi *People's Liberation Army* (PLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan berperang Tiongkok. Modernisasi tersebut terdiri dari *Pertama*, peningkatan angkatan laut dan angkatan darat. *Kedua*, peningkatan komando, control, dan operasi militer. *Ketiga*, memperkenalkan pasukan dukungan strategis (perang ruang angkasa, siber, dan elektronik). *Keempat*, percepatan pengembangan intelijen militer, *Kelima*, mendorong penggunaan industri dalam negeri melalui strategi ‘*Made in China 2025*’ (Zulkifli, Ramlee, Samiran, Yasid, & Rahman, 2023).



Gambar 4. 3 Data pengeluaran militer Tiongkok dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023

Sumber: Diolah dari data Statista (2024)

Kenaikan ekonomi Tiongkok nyatanya juga mempengaruhi total pengeluaran belanja militer Tiongkok tiap tahunnya. Pada Gambar 4.3, terlihat jelas bagaimana dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup drastis secara visual. Jika dihitung secara persentase, kenaikan pengeluaran militer Tiongkok dari tahun 2013 sampai dengan 2023 berdasarkan data mencapai 80 persen atau sebesar 132,37 miliar US Dolar. Waldron (2005, p. 721) menyatakan kekuatan militer Tiongkok telah berkembang pesat tepatnya pasca tragedi Tiananmen 1989.

Kemudian, Tiongkok juga seringkali melakukan hal-hal agresif di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan terkait isu klaim teritorialnya. Misalnya mengutip dari salah satu situs berita Filipina GMA News Online (2013), otoritas pemetaan negara Tiongkok Sinomap Press telah menampilkan sepuluh garis putus-putus sebagian besar di Laut Tiongkok Selatan yang menandakan bagian dari

provinsinya. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam sebagian teritorial lautnya juga ikut termasuk di dalam sepuluh garis putus-putus tersebut serta Tiongkok juga mencoba mengintimidasi Taiwan. Tiga tahun belakangan ini Tiongkok meningkatkan frekuensi dan skala patroli militer mereka di sekitar Taiwan. Pemerintah Taiwan juga melaporkan ribuan serangan siber dari Tiongkok per-harinya sejak tahun 2021 (Maizland, 2024).

Barat menilai aktivitas Tiongkok ini adalah usahanya untuk menjadi yang hegemoni di kawasan Asia (Türkcan, 2022). Li (2020, p. 184) menilai hegemoni yang dilakukan Tiongkok ini merugikan kepentingan geopolitik Amerika Serikat di Asia. Serta ini juga berpotensi merubah lanskap global, peralihan fokus strategis, dan mengurangi signifikansi supremasi Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat pada tulisan Li (2020, p. 184) meyakini bahwa investasi infrastruktur dan strategi perdagangan Tiongkok tersebut untuk memperkuat aspirasi geopolitiknya. Hal ini juga diiringi upayanya membangun dan memilitarisasi pos-pos terluar di Laut Tiongkok Selatan. Evi Fitriani (2025) juga menyatakan bahwa karena adanya kebangkitan ekonomi Tiongkok yang kuat. Hal ini yang berakibat Tiongkok dapat mengembangkan persenjataannya yaitu modernisasi militer.

Menurut James Heappey (2020-2024) selaku Minister of State for the Armed Forces Inggris mengatakan di web site UK Parliament (2021). Heappey memperkirakan, Tiongkok akan memiliki lima kapal induk pada tahun 2030, didukung empat kapal induk helikopter ringan serta kapal perusak penjelajah kelas tinggi yang terus bertambah, dan peningkatan pembangunan pangkalan militer

yang dibentengi oleh Tiongkok di pulau-pulau yang diperebutkan dan investasi besar untuk rudal anti-kapal. Hal ini, memungkinkan Tiongkok melakukan operasinya jauh dari jangkauannya dan berpotensi membatasi pergerakan kapal-kapal Inggris dan sekutu.

Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan salah satu negara kunci yang mendorong gagasan Indo-Pasifik ini, merasa terancam oleh aktivitas Tiongkok di kawasan. Amerika Serikat berusaha mencari peluang untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menentang pengaruh besar tersebut (Yadav, 2022, pp. 5-6). Pada dokumen *National Security Strategy of the United States of America* (2017, pp. 3, 46), Washington berkomitmen memajukan pengaruhnya untuk melawan dan mendukung kepentingannya. Disebutkan, Washington membawa sekutu-sekutunya di Asia seperti India, Jepang, Australia, dan termasuk sekutu lamanya yaitu Inggris. Hal ini untuk meningkatkan nilai tawar Amerika Serikat dan sekutu untuk mengurangi pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik.

Peningkatan kemampuan ekonomi, pertahanan, dan infrastruktur Tiongkok telah menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Indo-Pasifik, yang menguntungkan Tiongkok dalam ekspansi regionalnya. Oleh karena itu, didorong oleh rasa curiga dan merasa terancam oleh peningkatan kemampuan Tiongkok serta hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara ketiganya, Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya melakukan langkah-langkah untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik (Saputro, Ulung, & Abdurrohim, 2024, p. 2104).

Dr. Sophiana Widiastutie selaku Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional pada Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta. Menurutnya;

Hegemoni Tiongkok di Indo-Pasifik, menurut saya tidak terkait langsung dengan kepentingan Inggris, karena masalah Hong Kong sebagai wilayah yang dulu dikuasai Inggris sudah lama selesai. Tetapi yang terganggu lebih kepada kepentingan kelompok Barat, dalam hal ini yang utama adalah AS (Widiastutie, 2025).

Pada pandangan dalam pandangan Widiastutie (2025), mengenai hegemoni Tiongkok, posisi Inggris mengenai hal tersebut tidak terkait secara langsung dan tidak memengaruhi pula terhadap kepentingan Inggris. Sebenarnya menurut Widiastutie adalah lebih menganggu terhadap pandangan kepentingan Barat lainnya, utamanya adalah Amerika Serikat.

Dalam hal ini, Amerika Serikat lebih bermain dengan aliansi atau kemitraan. Ini dibuktikan terdapat aliansi-aliansi di kawasan Indo-Pasifik. Pada kawasan ini terdapat *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) terdiri dari Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, selanjutnya terdapat kemitraan keamanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) dibentuk untuk memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan Australia di Asia Timur, dan terakhir *Five Eyes* yang merupakan aliansi intelijensi antara Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat (Koga, 2023, p. 9).

Kehadiran Quad, AUKUS, dan *Five Eyes* menurut penulis ini dapat menjadi indikator terjadinya peningkatan penyeimbangan untuk urusan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Baik ketiganya, sama-sama bersinggungan dengan urusan keamanan di kawasan. Menurut Kementerian Pertahanan Indonesia (2023), baik Quad dan AUKUS sama-sama memiliki persamaan inti yaitu menghadapi kebangkitan

Tiongkok di Indo-Pasifik. Hanya saja, AUKUS memiliki program berbagi teknologi terkait kapal selam tenaga nuklir yang dibantu oleh Inggris. Sedangkan *Five Eyes* menurut Hall (2022) pada *Royal United Services Institute* (RUSI), merupakan aliansi intelijensi yang membantu negara anggota terkait isu yang tengah berkembang, termasuk kebangkitan Tiongkok.

Kemajuan Quad dan AUKUS terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut dari Tiongkok yang berusaha mengendalikan sistem internasional di kawasan Indo-Pasifik. Stoltz pada laporannya di Macdonald-Laurier Institute (2022) memandang bahwa sejak tahun 2016, Tiongkok menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dengan berbagai bentuk paksaan dan intervensi. Amerika Serikat menanggapnya untuk mendorong negara-negara untuk bersama-sama menentang dan melawan upaya paksaan Tiongkok, baik secara ekonomi, diplomatik, dan militer. Maka dari itulah, Quad, NATO, dan/atau kelompok lainnya merupakan pesan diplomatik yang cepat, tegas, dan nyata untuk menunjukkan ketegasan dan mencegah agresi lebih lanjut dari Tiongkok.

Ini mengindikasikan jelas bahwa memang terdapat persaingan atau perimbangan kekuatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tiongkok memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan diikuti dengan pertumbuhan sektor pertahanan dan keamanan militernya yang pesat pula. Walt (1987, p. 17) pada bukunya yang berjudul *The Origins of Alliances* tahun 1987, menyatakan bahwa ketika negara dihadapkan dengan ancaman eksternal yang signifikan, maka negara yang terancam tersebut akan menyeimbangkan ancaman eksternal tersebut. Kemudian, Walt (1987, pp. 19-20) juga memiliki dua hipotesis

yaitu *balancing* (menyeimbangkan) yang artinya penyelarasan bersama pihak yang lemah atau *bandwagoning* yang artinya pula penyelarasan bersama pihak yang lebih kuat.

Berdasarkan penemuan di atas, penulis melihat Amerika Serikat melakukan *balancing* atau menyeimbangkan bersama pihak yang lemah di Indo-Pasifik untuk menjaga kepentingannya dan melawan Tiongkok. Contoh terbaru dari penyeimbangan yang dilakukan Amerika Serikat adalah pembentukan kemitraan trilateral AUKUS. Jika menilik pandangan Walt (1987) menyenai hipotesisnya tersebut, strategi *balancing* juga tepat menurut penulis. kemitraan trilateral AUKUS merupakan strategi *balancing* oleh Amerika Serikat bersama Australia dan Inggris. Meski Inggris adalah kekuatan di Eropa, namun Inggris juga memiliki kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Akan tetapi perlu diingat, Inggris sudah tidak dapat di samakan sebagai negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Inggris memiliki hubungan spesial mengenai kepentingan strategis bersama Amerika Serikat. Inilah yang menjadi jawaban Inggris dapat melakukan kepentingannya bersama Amerika Serikat di kemitraan AUKUS (Fitriani, 2025).

Terlihat bahwa Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia melalui AUKUS berusaha menyeimbangkan kekuatan dengan membentuk aliansi untuk melawan kekuatan lebih besar dan menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun Inggris terletak di Eropa sana, tetapi peran Inggris di dalam AUKUS menunjukkan komitmen bersama antara ketiga negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik (The White House, 2021). Selain karena faktor keamanan, kehadiran AUKUS ini adalah sebenarnya juga merupakan sebuah

terobosan perdagangan pertahanan antara ketiga negara tersebut dan mampu ikut menumbuhkan ekonomi Inggris. Reformasi yang diumumkan pada kemitraan AUKUS ini, diperkirakan akan meningkatkan ekspor pertahanan Inggris hingga sebesar 500 juta Pound Sterling tiap tahunnya (Ministry of Defence, 2024).

Pada pernyataan Rishi Sunak di Parlemen Inggris, pada laporan *Integrated Review 2021* (*Integrated Review 2021*) telah menyoroti meningkatnya ketegasan internasional Tiongkok dan diidentifikasi sebagai ancaman terbesar berbasis negara terbesar terhadap keamanan ekonomi Inggris. Kemudian pada *Integrated Review Refresh 2023* yaitu pembaruan pandangan pemerintah mengakui bahwa Tiongkok sebagai tantangan sistemik yang mempengaruhi kebijakan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris (UK Parliament, 2023)

Pada konteks ini, konsep perimbangan kekuatan mendukung gambaran pemahaman di kawasan Indo-Pasifik. Kebangkitan Tiongkok dan persaingannya dengan kekuatan besar di Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya yaitu India, Jepang, Korea Selatan, dan Australia telah mendorong negara-negara lain memandang Tiongkok adalah ancaman (Deb & Wilson, 2021, p. 111). Inggris pun juga memiliki pandangan yang sama mengenai Tiongkok. International Institute for Strategic Studies (2021) menyatakan Inggris mengakui Tiongkok adalah negara otoriter. Inggris juga memperingatkan bahwa peningkatan kekuatan dan ketegasan internasionalnya kemungkinan akan menjadi faktor geopolitik paling signifikan di dunia.

#### 4.1.2 Politik Domestik Inggris Terhadap Kawasan Indo-Pasifik

Mengutip dari tulisan Abdurrohim, Kumalasari, dan Rosy (2023, p. 16), untuk meneliti sebuah kebijakan luar negeri menggunakan realisme neoklasik dibutuhkan kemampuan material mereka yang terkait kekuatan domestik untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri negara tersebut. Dalam mengembangkan kebijakan luar negeri, negara akan mempertimbangkan setiap variabel dan pengaruhnya terhadap output. Pengembangan kebijakan luar negeri seringkali dipengaruhi oleh faktor opini publik yang memengaruhi kapasitas negara untuk memberlakukan dan mengimplementasikan keputusan negara. Foyle dan Belle (2010) serta Baylis, Smith, dan Owens (2014, p. 377) mengatakan bahwa opini publik, kelompok kepentingan, media, perdagangan, kepentingan birokrasi, organisasi militer, pemimpin politik, bahkan identitas dan budaya negara dapat menjadi acuan dalam politik domestik. Politik domestik ini juga sesuai dengan pemikiran realisme neoklasik yang melihat internal Inggris.

Opini publik memiliki pengaruh besar untuk negara dalam pemutusan suatu kebijakan. Opini publik ini akan melihat bagaimana pandangan masyarakat negara mengenai suatu hal atau fenomena. Hennesy pada Chatamallah (2007, p. 252) menyatakan, pembuat kebijakan mempertimbangkan opini publik yang terdiri dari berbagai pandangan, kelompok, dan individu yang dapat disebut sebagai opini publik atau pandangan yang dianut oleh masyarakat. Opini ini memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai cara dan kombinasi suara untuk mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Ini dimaknakan bahwa opini publik dapat digunakan sebagai referensi alasan negara membuat suatu kebijakan.

#### 4.1.2.1 Opini Publik Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik

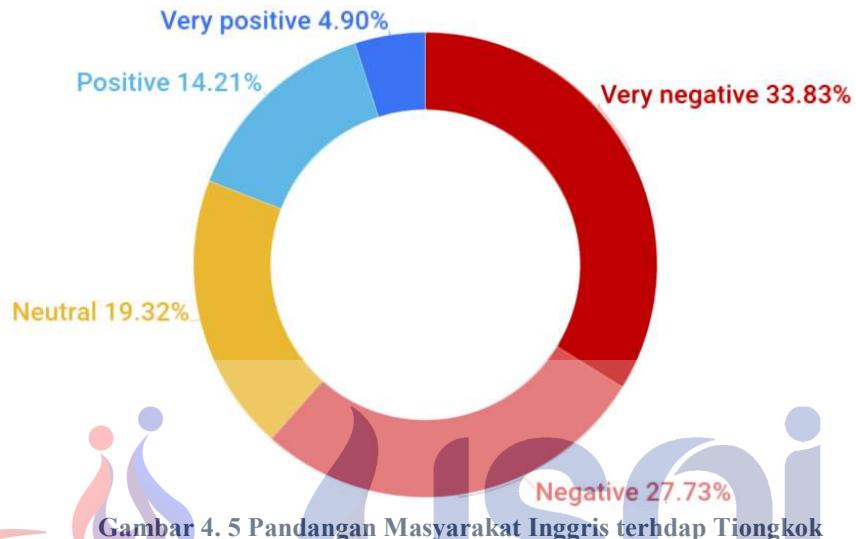
Pada sub-bab ini, akan lebih menjelaskan terhadap opini-opini publik Inggris terkait kawasan Indo-Pasifik, baik hubungannya antara Inggris dengan Tiongkok di bidang ekonomi, perdagangan, keamanan, dan pertahanan, Indo-Pasifik, dan mitra-mitra lainnya di kawasan tersebut.



Sumber: Pew Research Center (2022)

Lembaga penelitian dan analisis data non-partisan asal Amerika Serikat Pew Research Center (2022), melaporkan pandangan negatif terhadap Tiongkok menigkat di sebagian besar negara-negara maju. Seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa berpandangan negatif meningkat tajam terhadap Tiongkok. Begitupun dengan Inggris pada Gambar 4.4 di atas, 69 persen publik Inggris berpandangan tidak menguntungan terhadap Tiongkok dan meningkat dalam lima tahun belakangan ini. Pew Research Center (2022) juga melihat pada tahun 2020, masyarakat Eropa melihat Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dominan dunia, dan

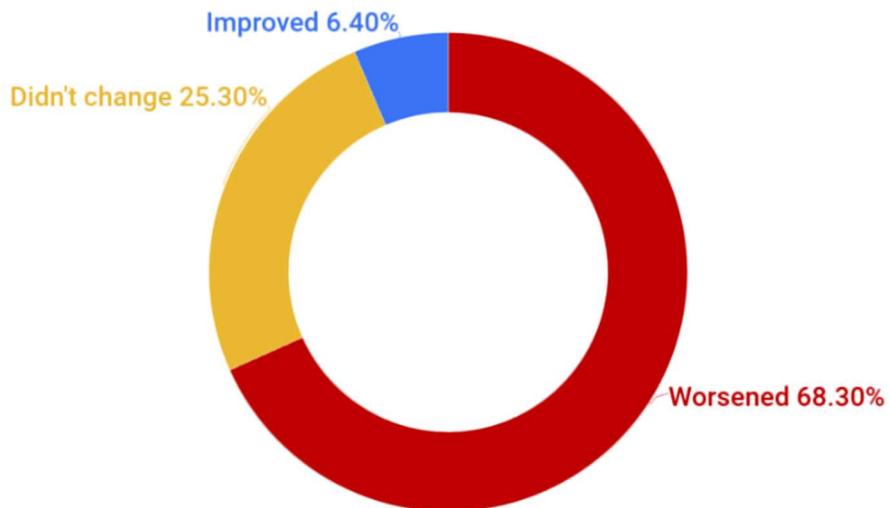
begitupun dengan publik Inggris. Publik Inggris berpandangan 47 persen setuju bahwa Tiongkok adalah kekuatan ekonomi dunia sedangkan 37 persen mengatakan Amerika Serikat kekuatan ekonomi dunia.



Gambar 4. 5 Pandangan Masyarakat Inggris terhadap Tiongkok

Sumber: (Summers, Turcsányi, Šimalčík, Kironská, & Sedláková, 2020, p. 11)

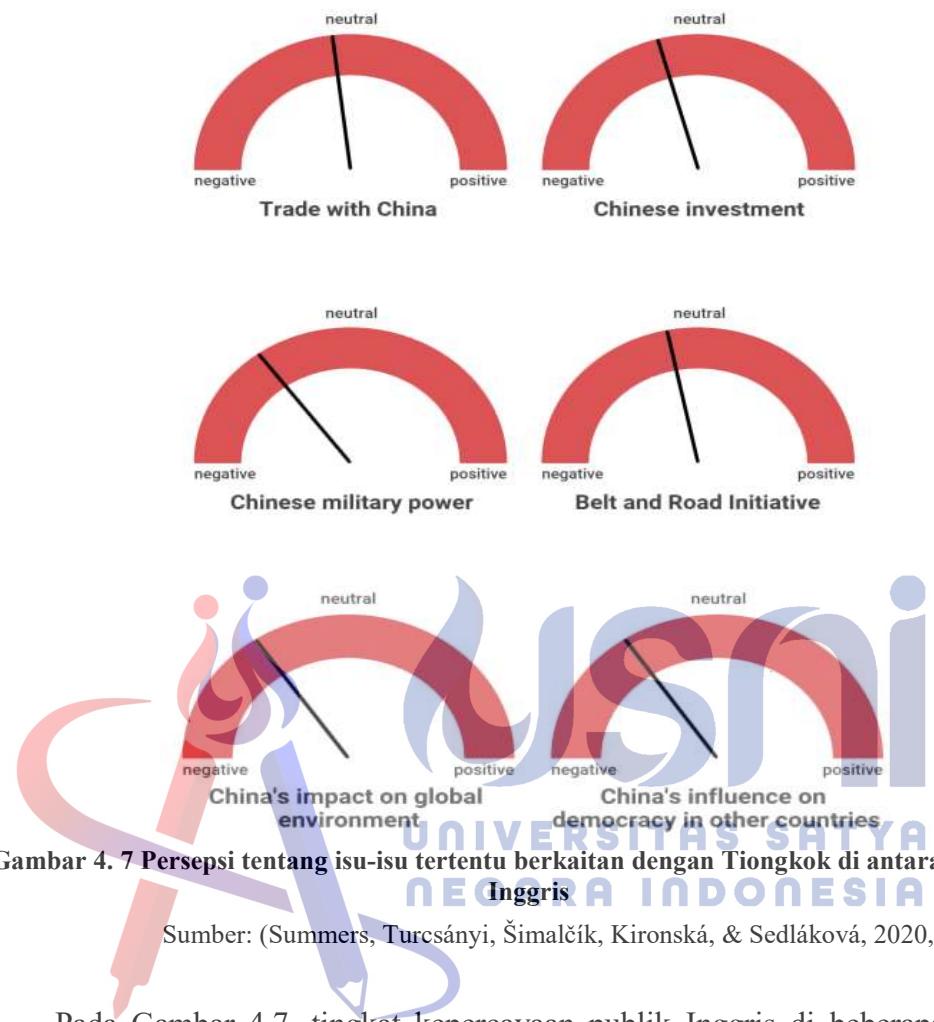
Mengutip pada laporan survei yang dilakukan Summers, et al. pada Central European Institute of Asian Studies (2020, p. 6) pada Gambar 4.5. Sebanyak 61,5 persen publik Inggris merespon negatif terhadap pandangannya kepada Tiongkok, yaitu sebesar 27,73 negatif, dan 33,83 persen sangat negatif. Sebanyak 19,1 persen publik Inggris merespon positif Tiongkok dan sisanya mengatakan netral.



**Gambar 4. 6 Perubahan pandangan masyarakat Inggris terhadap Tiongkok dalam tiga tahun terakhir**

Sumber: (Summers, Turcsányi, Šimalčík, Kironská, & Sedláková, 2020, p. 6)

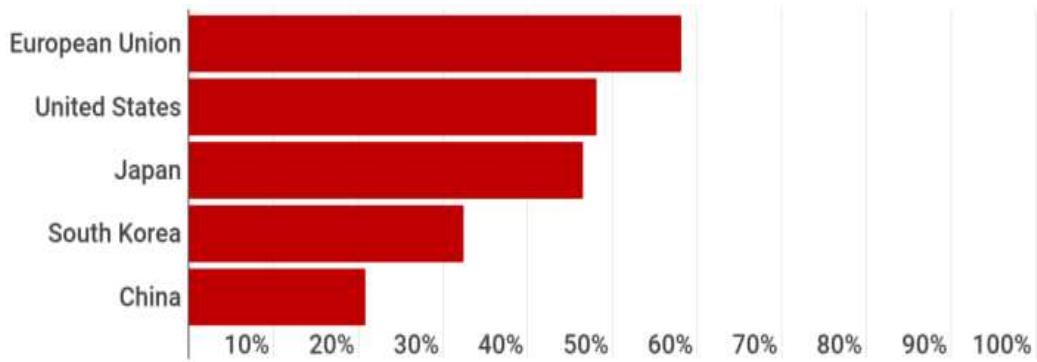
Mengutip pada laporan survei yang dilakukan Summers, et al. pada Central European Institute of Asian Studies (2020, p. 6) pada Gambar 4.6, sebagian besar dalam tiga tahun terakhir publik Inggris merespon 68,30 persen pandangannya terhadap Tiongkok memburuk. Sebanyak 25,30 persen tidak berubah dan 6,40 persen membaik pandangannya.



Gambar 4.7 Persepsi tentang isu-isu tertentu berkaitan dengan Tiongkok di antara responden Inggris

Sumber: (Summers, Turcsányi, Šimalčík, Kironská, & Sedláková, 2020, p. 6)

Pada Gambar 4.7, tingkat kepercayaan publik Inggris di beberapa sektor terhadap Tiongkok pun juga rendah. Namun, mereka lebih memandang sedikit positif di bidang perdagangan dan investasi dengan Tiongkok. Publik Inggris sangat memandang negatif terhadap Tiongkok dalam urusan militernya, pengaruh Tingkok terhadap demokrasi di negara-negara lain, dan dampak Tiongkok terhadap lingkungan global.

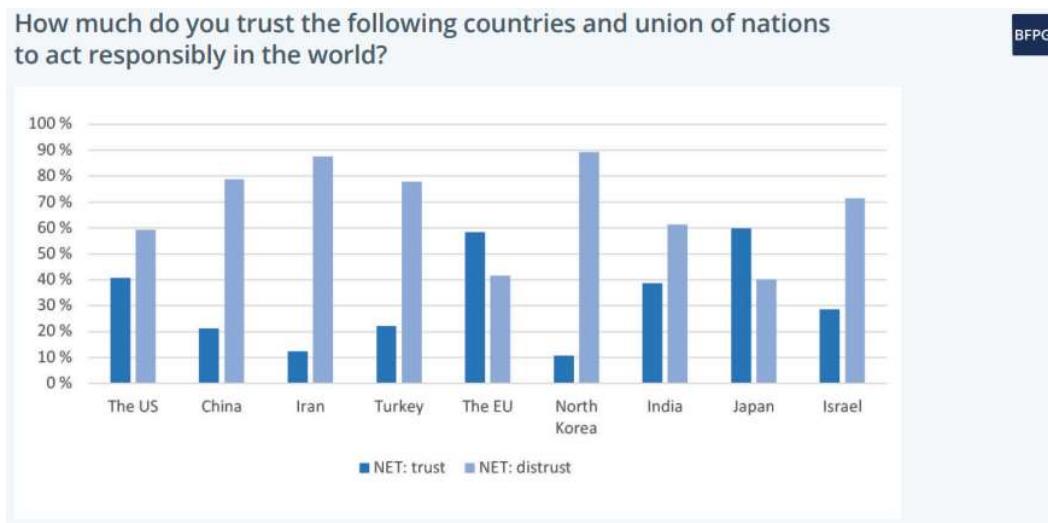


**Gambar 4. 8 Persepsi agar Inggris bekerja sama dengan negara-negara berikut terkait pengembangan jaringan 5G (% responden setuju)**

Sumber: (Summers, Turcsányi, Šimalčík, Kironská, & Sedláková, 2020, p. 8)

Sedangkan untuk teknologinya yaitu dalam pembangunan infrastruktur 5G pada Gambar 4.8, publik Inggris lebih menyukai bermitra dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan daripada dengan Tiongkok. Setelah Brexit, Tiongkok dipandang lebih penting bagi Inggris. Padahal jika melirik berita-berita terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris tahun 2010, dinyatakan bahwa Inggris mendapatkan dan menyetujui sembilan investor dari Tiongkok senilai 300 juta pound sterling dan menciptakan 1.200 lapangan pekerjaan (Department for Business, Innovation & Skills, 2010).

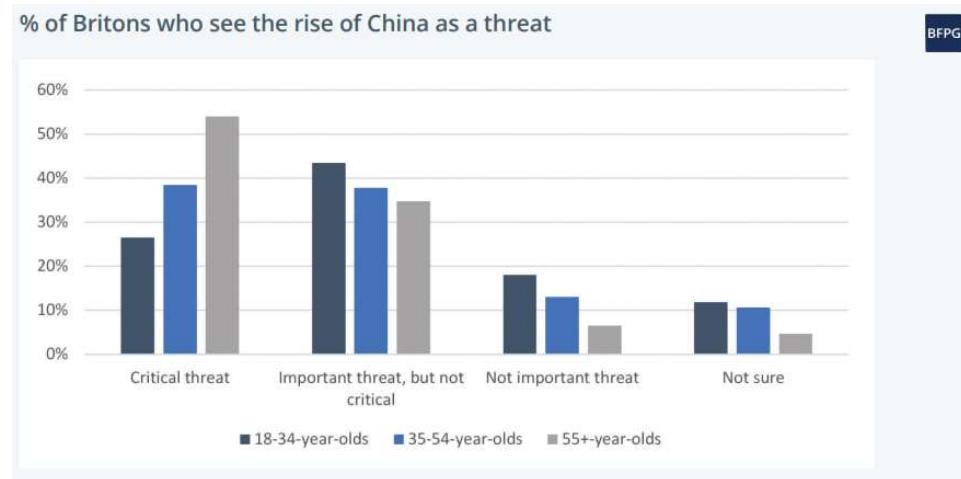
Meskipun persaingan strategis antara AS dan Tiongkok menciptakan lingkungan yang lebih rumit untuk kebijakan Inggris terhadap Tiongkok. Tiongkok dipandang lebih penting oleh Inggris setelah Brexit. Brexit juga menambah ketidakpastian atas strategi kebijakan luar negeri dan keamanan jangka panjang Inggris serta posisi Tiongkok di dalamnya (Summers, Turcsányi, Šimalčík, Kironská, & Sedláková, 2020, pp. 4-5).



**Gambar 4. 9 Penilaian para responden mengenai kepercayaan negara-negara tersebut terhadap tanggung jawab di dunia**

Sumber: Gaston (2020, p. 39)

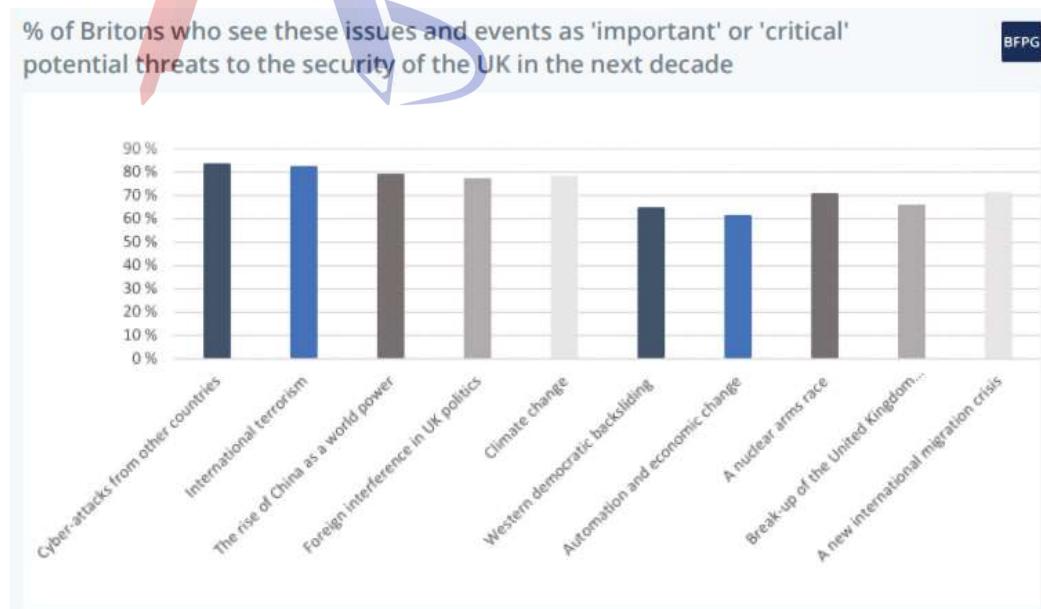
Beralih ke lembaga think tank independen non-partisan lainnya. kali ini, mengutip dari lembaga yang berbasis di Inggris yaitu British Foreign Policy Group (BFPG) pada Gambar 4.9. Pada laporannya di *UK Public Opinion on Foreign Policy and Global Affairs: Annual Survey 2020* menyatakan 79 persen publik Inggris tidak mempercayai Tiongkok bertindak secara bertanggungjawab terhadap global dan 21 persen menyatakan sebaliknya. Selain Tiongkok, Korea Utara juga mendapatkan skor 89 persen. Sebanyak 28 persen publik Inggris juga memandang kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global juga menjadi ancaman keamanan/pertahanan terhadap kepentingan vital Inggris. Program nuklir Korea Utara juga dianggap mengancam bagi kepentingan vital Inggris dengan persentase 42 persen dan diikuti kekuatan militer Rusia sebesar 33 persen. Tetapi, 42 persen publik Inggris juga masih merasa ketidakstabilan politik di Timur Tengah juga mengancam bagi kepentingan Inggris (Gaston, 2020, pp. 39, 50-51).



**Gambar 4. 11 Persentase warga Inggris yang melihat kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman**

Sumber: Gaston dan Aspinall (2021, p. 78)

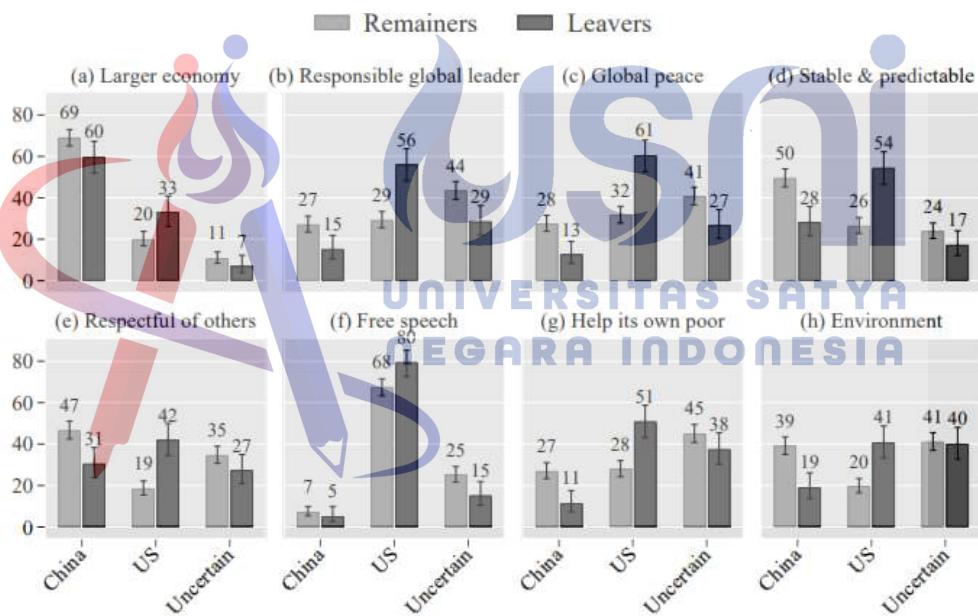
Pada tahun 2021, BFPG (2021) kembali melakukan statistik pandangan publik Inggris. Pada Gambar 4.10, sebanyak 40,33 persen publik Inggris melihat kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman kritis dan 38,66 persen menilai ancaman penting. Sisanya memandang bukan ancaman penting dan tidak yakin (Gaston & Aspinall, 2021, pp. 78-80).



**Gambar 4. 10 Persentase warga Inggris yang melihat masalah-masalah berikut sebagai ancaman potensial yang kritis terhadap keamanan Inggris dalam dekade mendatang**

Sumber: Gaston dan Aspinall (2021, p. 78)

Statistik selanjutnya masih sama lembaganya yaitu BFPG (2021). Gaston dan Aspinall mensurvei masalah-masalah potensial yang berpotensi mengancam keamanan Inggris dalam dekade kedepan. Pada Gambar 4.11 dalam hal ancaman potensial penting dan kritis dalam dekade berikutnya, publik Inggris kembali memandang bahwa kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global persentasenya menjadi 79 persen. Bahkan sebanyak 87 persen pemilih konservatif menunjukkan tingkat kekhawatiran tertingga mengenai Tiongkok sebagai kekuatan global (Gaston & Aspinall, 2021, pp. 78-80).

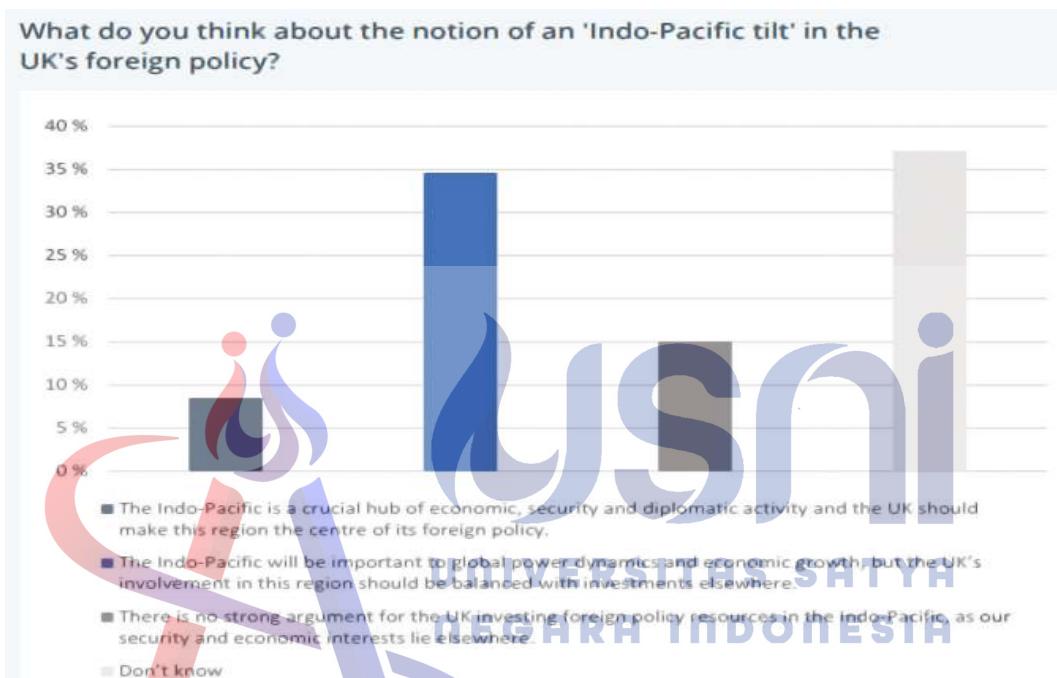


**Gambar 4. 12 Identitas dan pandangan Brexit dari Tiongkok versus Amerika Serikat**

Sumber: Chow, Han, dan Li (2019, p. 1385)

Pada penelitian lainnya yaitu Chow, Han, dan Li (2019, pp. 1385-1386) pada Gambar 4.12, menemukan dua penemuan pada penelitiannya. Ketiganya menemukan bahwa publik Inggris umumnya tidak memiliki pandangan positif mengenai Tiongkok. Jadi, publik Inggris sebagian besar memandang negatif Tiongkok dalam hal kekuatan militernya. Namun publik Inggris juga memandang

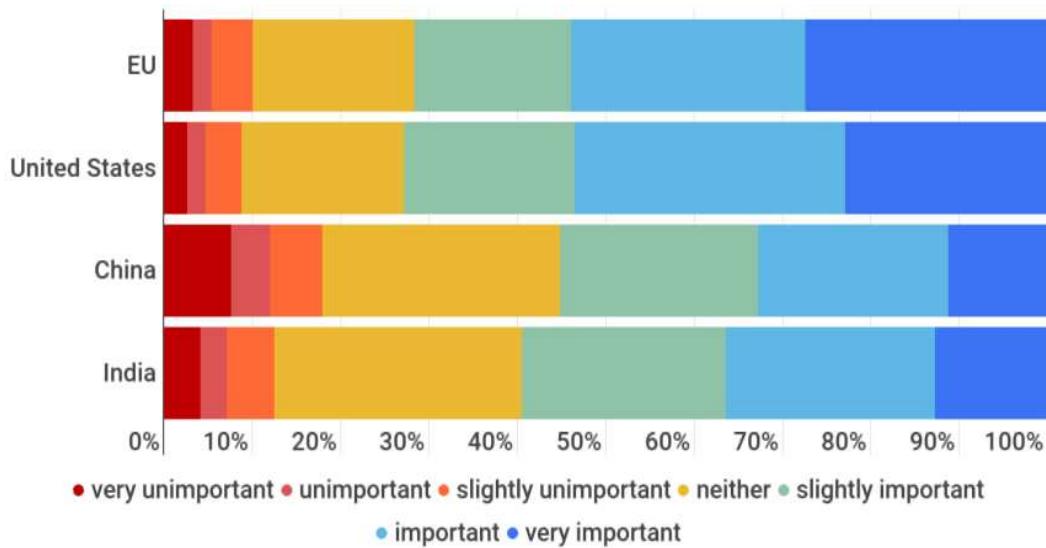
Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terbesar, bahkan lebih stabil dari pada Amerika Serikat. Tetapi, jika dibandingkan masalah perdamaian, Amerika Serikat tetap dipandang sebagai pemimpin global yang bertanggung jawab dan pembela perdamaian global.



**Gambar 4.13 Pendapat tentang gagasan kemiringan atau fokus Indo-Pasifik dalam kebijakan luar negeri Inggris**

Sumber: Gaston dan Aspinall (2021, p. 55)

Mengutip dari lembaga BFPG pada Gambar 4.13 di atas, terdapat 8 persen publik Inggris yang setuju agar Inggris menjadikan Indo-Pasifik sebagai pusat politik kebijakan luar negerinya. Serta, sebanyak 35 persen publik Inggris juga setuju atas keterlibatan Inggris di Indo-Pasifik, namun harus diimbangi dengan investasi di tempat lain. Baik masyarakat Inggris yang sosial ekonomi tinggi maupun rendah, sama-sama menyatakan bahwa Indo-Pasifik akan penting bagi dinamika kekuatan global dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keterlibatan Inggris di kawasan harus diseimbangkan dengan investasi di tempat lain.



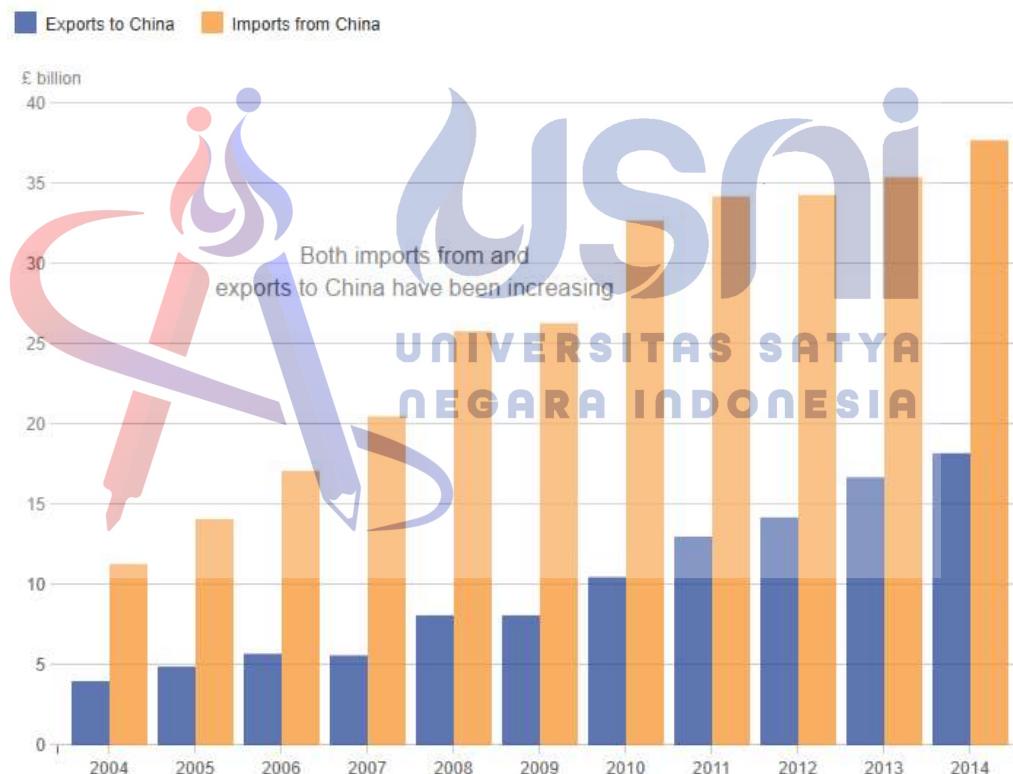
**Gambar 4. 14 Seberapa penting atau tidak pentingnya perjanjian perdagangan bebas dengan negara tersebut setelah Brexit**

Sumber: Summers, Turcsányi, Šimalčík, Kironská, & Sedláková (2020, p. 12)

Selanjutnya pada laporan survei Central European Institute of Asian Studies (2020, pp. 4, 12) pada Gambar 4.14, juga menunjukkan bahwa secara keseluruhannya publik Inggris merasa Tiongkok adalah negara yang cukup penting untuk dilakukannya perdagangan bebas pasca Brexit. South China Morning Post (2021) juga telah melakukan survei. Survei tersebut menunjukkan bahwa 22 persen publik Inggris mendukung agar Inggris mengejar hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan 8 persen publik Inggris mendukung perpindahan Inggris ke Indo-Pasifik.

#### 4.1.2.2 Kepentingan Ekonomi Inggris di kawasan Indo-Pasifik

Kehadiran Inggris di Indo-Pasifik ini sangat terkait kepentingan ekonominya. Inggris hadir di kawasan Indo-Pasifik atas responnya setelah mengalami Brexit. Pasca Brexit, Inggris harus menentukan pasar baru di kawasan lain. Hal ini karena Inggris tidak dapat hanya mengandalkan perdagangan di kawasan Eropa dan Atlantik saja. Inggris perlu mencari kawasan-kawasan yang masih berkembang seperti kawasan Indo-Pasifik ini.



Gambar 4. 15 Ekspor dan impor barang dan jasa dengan Tiongkok, 2004 hingga 2014

Sumber: Office for National Statistics (2015)

Berdasarkan data dari Office for National Statistics (2015), Inggris dan Tiongkok pernah menjadi mitra dagang kedua negara. Ini dibuktikan dengan publikasi oleh Office for National Statistics (2015) pada Gambar 4.15. Menurut Office for National Statistics (2015), sejak tahun 2004 Tiongkok penting bagi

ekonomi Inggris sebagai mitra dagang dan telah meningkat secara konsisten. Tiongkok menjadi mitra impor non-UE terbesar kedua bagi Inggris setelah Amerika Serikat, menyumbang 7 persen dari impor Inggris pada 2014 dibandingkan dengan 3,3 persen pada 2004. Pada Gambar 4.15, perdagangan barang mendominasi hubungan Inggris dan Tiongkok. Impor dari Tiongkok meningkat dari 11,3 miliar pound sterling pada 2004 menjadi 37,7 pound sterling pada tahun 2014. Sedangkan nilai ekspor 4 miliar pound sterling menjadi 18,2 miliar pound sterling pada rentan tahun yang sama pula.

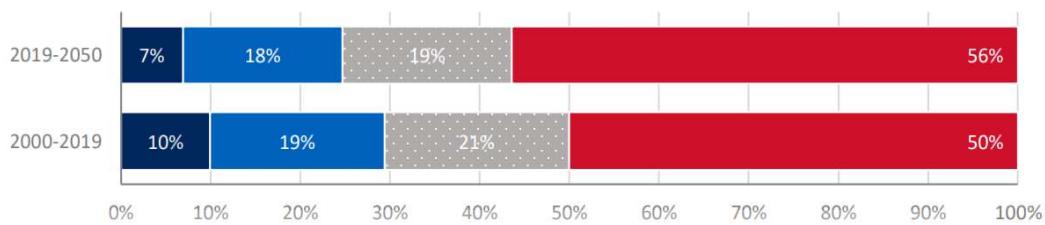
Hubungan secara antar pemerintahan, London dengan Beijing pernah memasuki era keemasan pada masa Pemerintahan Cameron tepatnya tahun 2015. Perdana Menteri Tiongkok Xi Jinping (2013-saat ini) mengunjungi Inggris dan kedua kepala pemerintahan mempromosikan kerja sama yang erat di dibang perdagangan dan investasi. Pemerintah Inggris nyatanya juga pernah mengabaikan lobi konsisten pemerintahan Obama dan secara sepihak bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* yang dipimpin Tiongkok. Kemudian di pemerintahan Theresa May (2016-2019), kembali melanjutkan hubungannya dengan Tiongkok (Chow, Han, & Li, 2019, p. 1373). Selain hubungan Inggris-Tiongkok yang kuat, tujuan dari kebijakan Pemerintah Inggris terhadap Tiongkok adalah peningkatan perdagangan dan investasi bilateral serta kerja sama hal global seperti kesehatan, iklim, pembangunan, pendidikan, pariwisata, dan keamanan regional. Namun di sisi lain, kemitraan Inggris-Tiongkok terdapat hal-hal yang mana Pemerintah Inggris tidak menyetujuinya (UK Parliament, 2019).

Sejak tahun 2016, terjadi referendum untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit dan pada tahun 2020 Inggris resmi melakukan Brexit. Alhasil, Inggris tidak akan memiliki akses pasar tunggal Uni Eropa, maka Inggris perlu mengamankan sektor perdagangannya dengan mencari kemitraan ekonomi lebih jauh dan stabil. Mengutip dari Reuters pada majalah berita Firstpost (2018), May melakukan kunjungan ke Tiongkok dan menandatangani kesepakatan bisnis senilai 9 miliar Euro dengan Tiongkok. Bahkan, Inggris pernah menjadi penerima *foreign direct investment* terbesar kedua di Eropa pada tahun 2019 (Harris, Neal, & McConalogue, 2021, p. 4).

Pada tahun 2019, Inggris bersama Tiongkok mencapai kesepakatan untuk mencabut larangan yang telah aktif sejak 1996 mengenai ekspor daging sapi dari Inggris senilai 250 juta Pound Sterling. Inggris juga telah membentuk kelompok kerja dialog perdagangan tingkat tinggi dengan mitra utama seperti Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, *the Gulf Cooperation Council*, India, Jepang, dan Selandia Baru. Inggris juga menggunakan instrument perdagangan bersama negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Brazil (Gardiner J. E., 2019; Courtown, 2019).

Dalam adu argumen antara Jim Shannon dari Partai Persatuan Demokratik atau Democratic Unionist Party kepada George Hollingbery selaku Minister of State for Trade Policy di situs web Parlemen Inggris (2019). Shannon menanyai langkah-langkah yang diambil kementerian untuk memfasilitas perdagangan Inggris pasca Brexit apakah ke Tiongkok, Amerika Serikat, atau Australia kepada Kementerian Perdagangan Inggris. Hollingbery meresponnya bahwa Pemerintah Inggris bekerja aktif untuk mendukung perdagangan dan mengurangi hambatan-

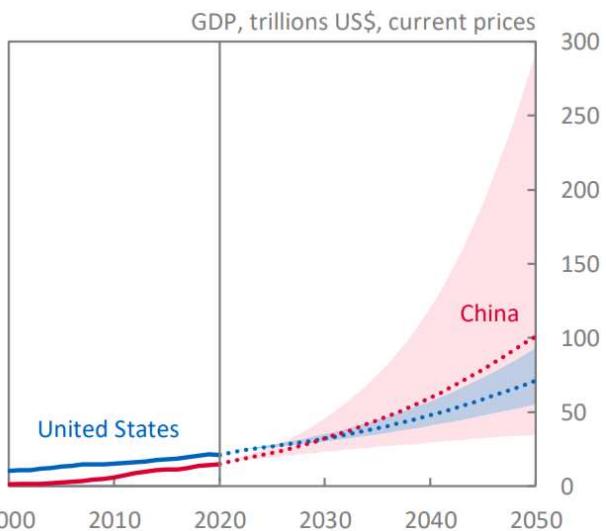
hambatan di ketiga negara tersebut. Pemerintah sedang mempersiapkan negosiasi perdagangan dan peningkatan akses pasar termasuk perdagangan bebas bersama Amerika Serikat dan Australia. Khusus Tiongkok dikatakan bahwa akan meninjau perdagangan dan investasi bersama, karena belum diputuskan masa itu (UK Parliament, 2019).



**Gambar 4. 16 Penggerak regional pertumbuhan ekonomi global dalam istilah nyata**

Sumber: (Department for International Trade, 2021, p. 7)

Mengutip dari UK Departement for International Trade (2021, p. 7), pusat gravitasi ekonomi dunia telah bergeser ke Timur selama beberapa dekade. Pergeseran ke timur ini disebabkan oleh pertumbuhan pesat di Indo-Pasifik. Pada antara tahun 2000 dan 2019 (Gambar 4. 16), Indo-Pasifik menyumbang 50 persen dari pertumbuhan ekonomi global secara riil. Sedangkan Uni Eropa hanya menyumbang 10 persen dari pertumbuhan ekonomi global pada periode yang sama.



Gambar 4.17 PDB Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Dolar

Sumber: (Department for International Trade, 2021, p. 9)

UK Departement for International Trade (2021, p. 9) pada Gambar 4. 17, juga menyatakan bahwa Tiongkok merupakan pendorong utama dalam pergeseran ekonomi global ini. Mereka memperkirakan pada tahun 2030 hingga 2050, Tiongkok akan menjadi yang terbesar di dunia dan mengantikan posisi Amerika Serikat dalam hal Paritas Daya Beli atau *Purchasing Power Parity*.

Namun semenjak pemerintahan era Boris Johnson (2019 – 2022), London semakin terlihat menentang Tiongkok. Bukan karena Johnson seorang yang anti-Tiongkok, tetapi ini merupakan cerminan dari aktivitas kebangkitan Tiongkok itu sendiri (Bromund, 2022, p. 3). Gregory W. Hands selaku Minister of State for Trade Policy (2020-2021) menyatakan Tiongkok telah membungkam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan tidak dapat diterima. Boris Johnson merespon Tiongkok diberikan sanksi (UK Parliament, 2021). Pada tahun 2022, Inggris juga menjatuhkan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap para pejabat senior Tiongkok. Bahkan Dialog Ekonomi dan Keuangan atau *Economic and Financial*

*Dialogue* antara Inggris dan Tiongkok belum dijalankan lagi sejak pertemuan ke-10 pada Juni 2019. Untuk saat ini, Pemerintah Inggris masih akan mendukung rakyat Hong Kong untuk menyerukan kebebasan mereka dari Tiongkok (UK Parliament, 2022).

Mantan Komisaris Tinggi Australia untuk Inggris Alexander Downer pada The Guardian (2021) juga mengungkapkan kebangkitan Tiongkok menjadi masalah geopolitik terbesar saat ini. Agar dianggap pemain global, Inggris harus menanggapi kebangkitan Tiongkok dan menerima Indo-Pasifik adalah pusat geopolitik baru. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 Inggris sendiri telah khawatir mengenai Tiongkok.

*Pertama*, pada Oktober 2020, Inggris memperketat aturan untuk mencegah pencurian kekayaan intelektual oleh mahasiswa Tiongkok yang memiliki implikasi pertahanan. *Kedua*, November 2020, Inggris mengumumkan rencana untuk menghapus vendor berisiko tinggi dari jaringan 5G mereka, termasuk Huawei. Ini sejalan dengan kebijakan sekutu intelijen Inggris, yaitu Amerika Serikat, yang dianggap Huawei sebagai resiko. *Ketiga*, Oktober 2021, Inggris membuka jalur kewarganegaraan bagi sekitar 2,9 juta warga Hong Kong yang menjadi korban pengkhianatan Tiongkok terhadap Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984 tentang Hong Kong. *Terakhir*, Maret 2022, Inggris mulai mencari investor swasta untuk mengeluarkan *China General Nuclear Power Group* yang didukung oleh negara Tiongkok dari proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Sizewell C (Bromund, 2022, p. 3). Harris, Neal, dan McConalogue (2021) menilai bahwa ketergantungan

yang berlebihan pada investasi Tiongkok berpotensi mengancam kepentingan nasional dan memperlambat kepentingan strategis jangka panjang Inggris.

Pasca Brexit, London mengincar kawasan Indo-Pasifik untuk perjanjian perdagangan bebas bilateral dan berminat pada perjanjian multilateral seperti Perjanjian Komprehensif dan progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Gilli, 2019, p. 44). Pada pidato kunjungannya Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt (2018-2019) di Singapura tahun 2019, telah menyoroti pentingnya hubungan Inggris dengan negara-negara Asia termasuk ASEAN seperti isu ekonomi, perdagangan, dan demokrasi. Hunt juga menyebutkan pusat gravitasi ekonomi global bergeser ke Asia. Ini dibuktikan dengan Inggris adalah investor terbesar di Asia Tenggara yang berasal dari Eropa dengan perdagangan ASEAN mencapai 37 miliar pound sterling (Foreign & Commonwealth Office, 2019).

Inggris berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan dan kemitraan ekonomi dan keamanan di Indo-Pasifik serta merupakan bagian dari pergeserannya ke Indo-Pasifik. Pejabat Parliamentary Under-Secretary of State for Exports di bawah naungan Kantor Luar Negeri Inggris Graham Stuart, menyatakan strategi Pemerintah Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik akan dibangun investasi sebesar 180 miliar pound sterling di kawasan dan 151 miliar pound sterling di Inggris. Kegiatan perdagangan bebas dan akses pasar Inggris akan mendorong lingkungan investasi bilateral yang lebih menguntungkan (UK Parliament, 2021).

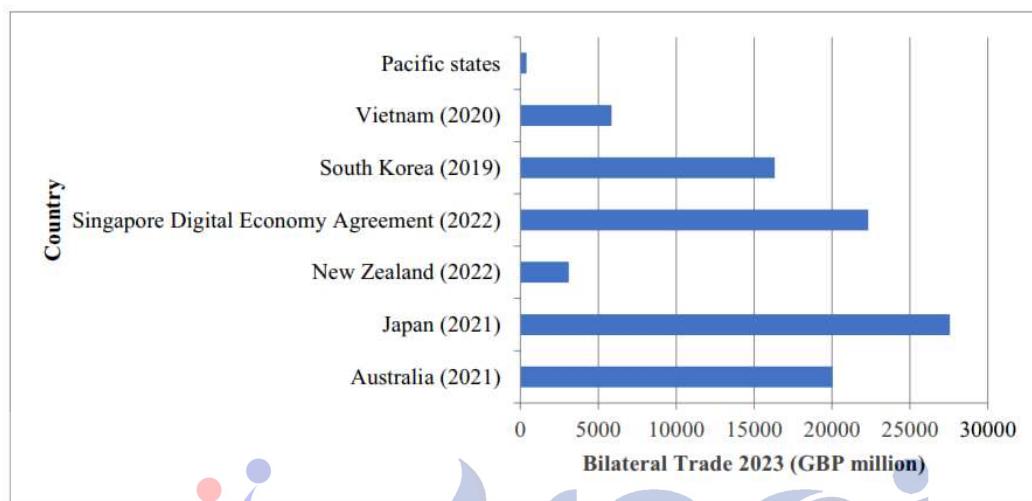
Mengutip dari siaran pers Kementerian Perdagangan Internasional Inggris dan Perdana Menteri Inggris Elizabeth Truss (2019), *Office for National Statistics* mencatat terjadi kenaikan ekspor ke negara-negara non-Uni Eropa sebesar 4,2

persen. Permintaan barang dan jasa di Tiongkok naik signifikan pasca kehadiran *Department for International Trade (DIT)* di Beijing Expo 2019. Jadi pada periode tersebut naik 13,9 persen. Lalu menjelang Piala Dunia Rugby, nilai ekspor barang dan jasa ke Jepang juga naik 9,2 persen sampai akhir Juni 2019.

Mengutip data statistik resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Internasional Inggris pada Ekspor Pertahanan dan Keamanan Inggris terbitan tahun 2020, disebutkan bahwa fokus pasar ekspor industri Inggris adalah Asia-Pasifik. Meskipun Eropa merupakan pasar ekspor terbesar untuk industri keamanan Inggris dengan nilai mencapai 2,59 miliar pound sterling, diikuti oleh Amerika Utara, namun Asia-Pasifik menjadi pasar yang paling penting dengan nilai ekspor mencapai 0,82 miliar pound sterling (Department for International Trade, 2020).

Perdagangan jasa Inggris, tidak termasuk perjalanan, transportasi, dan perbankan, baik ekspor atau impor pada tahun 2015-2018 ke Benua Asia meningkat tiap tahunnya, namun tetap berada di bawah Benua Eropa dan Benua Amerika. Data dari Office for National Statistics (2020) menyatakan bahwa, tahun 2015 ekspor dari Inggris ke Asia mencapai 21,4 miliar pound sterling dan tahun 2018 mencapai 28,7 miliar pound sterling. Sama halnya untuk nilai import dari Asia ke Inggris, pada tahun 2015 senilai 9 miliar pound sterling dan tahun 2018 mencapai 13,5 miliar pound sterling. Bahkan pemerintah Inggris juga membentuk delapan atase pertanian, makanan, dan minuman Inggris untuk pasar pertumbuhan Amerika, Afrika, dan Indo-Pasifik (UK Parliament, 2022).

Summers, Li, dan Miao (2024) menyatakan, pada tingkat struktural pusat gravitasi ekonomi global telah bergeser secara bertahap ke arah Asia dan *Global*



**Gambar 4. 18 Volume perdagangan dan perjanjian yang berlaku antara Inggris dan negara-negara di Indo-Pasifik**

Sumber: Tim Summers, Chen Li, dan Chunzi Miao (2024)

*South.* Kawasan ini bertransformasi secara ekonomi dan sosial secara signifikan serta membangun jaringan politik, ekonomi, dan sosial budaya baru. Summers, Li, dan Miao (2024) juga mengatakan bahwa Inggris saat ini mengadopsi istilah ‘*tilt to the Indo-Pacific*’ untuk menggambarkan pendekatan terhadap Asia secara luas. Ini juga termasuk bentuk keterlibatan institusi di kawasan Asia, dari ASEAN hingga *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) dan dilakukan bersamaan dengan penyesuaian dalam pendekatan kebijakan Inggris terhadap Tiongkok dan inisiatifnya seperti misalnya *Belt and Road Initiative* (BRI).

Inggris telah melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik pada Gambar 4. 18 di atas. Summer, Li, dan Miao (2024) menjelaskan, pendekatan Inggris di kawasan Indo-Pasifik ini nyatanya juga

melibatkan hubungan perdagangan dan investasi yang lebih dalam. Hubungan bilateral utama Inggris di kawasan ini adalah bersama Jepang dan perjanjian perdagangan bebas lainnya dengan India, Korea Selatan, Vietnam, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Jepang. Perjanjian-perjanjian perdagangan Inggris dengan negara kawasan Indo-Pasifik akan membantu menempatkan strategi *Global Britain* di jantung kawasan Indo-Pasifik.

Berdasarkan analisis penulis di situs pemerintahan Inggris, hingga tulisan ini dibuat, Inggris memang telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik. Penulis menemukan bahwa Inggris telah melakukan kerja sama perdagangannya di kawasan Indo-Pasifik. Misalnya seperti beberapa kerja sama ekonomi antara Inggris dengan negara Australia (2021) dan Selandia Baru (2021) terkait Perjanjian Perdagangan Bebas, selanjutnya dengan Singapura (2022) terkait Perjanjian Ekonomi Digital, dan kemudian dengan Jepang (2020) terkait *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).

Mengutip dari Parlemen Inggris, Menteri Investasi Inggris Gerard E. Grimstone (2020-2022) dan Menteri Negara untuk Perdagangan Internasional Inggris Elizabeth Truss (2019-2021) menyatakan bahwa perjanjian CPTPP (masih dalam proses negosiasi, resmi bergabung pada 16 Juli 2023) ini dan perjanjian lainnya sesama anggota CPTPP lainnya akan menjadi pintu gerbang ke kawasan Indo-Pasifik yang berkembang dengan pesat dan akan meningkatkan upaya Inggris untuk bergabung dalam CPTPP (Grimstone, 2021; Truss, 2021).

Menurut Fitriani pada wawancara yang dilakukan penulis menyatakan bahwa:

“... Tiongkok adalah mitra ekonomi, karena bagi Inggris dan bagi negara-negara Uni Eropa, pasar China itu sangat besar, sangat ... (*suara tidak jelas*), mereka rebutan masuk itu pasar China. Jadi bagi mereka China adalah mitra ekonomi yang penting, pasar yang penting, nah baru kemudian sekitar sepuluh tahun ini terjadi perkembangan, ketika Tiongkok memperkuat militernya dan banyak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap ancaman di daerah Asia-Pasifik. Nah itu baru, kemudian di anggap China mengancam...” (Fitriani, 2025).

Jadi intinya adalah, Pemerintah Inggris melihat bahwa Tiongkok adalah mitra ekonomi terbesarnya sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Pemerintah Inggris juga telah melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik ini.

#### **4.1.2.3 Dinamika Perpolitikan Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik**

Selanjutnya bergeser ke isu politik. Gilli (2019, p. 44) menyampaikan sejak perang di Afghanistan pada tahun 2001 Inggris mulai beralih ke Asia. Peralihan ini berlangsung perlahan selama dua dekade terakhir dan belakangan ini berlangsung cepat karena peningkatan militerisasi Tiongkok dan Brexit. Partai Konservatif sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Tariq M. Ahmad mewakili Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris menyatakan di Inggris telah melakukan diskusi bersama Amerika Serikat mengenai strategi Indo-Pasifik bersama Jepang juga. Pemerintah Inggris meyakini terdapat peluang besar untuk meningkatkan konektivitas kawasan, terutama investasi infrastruktur yang besar (UK Parliament, 2018).

Pemerintah Inggris melalui Minister of State for the Armed Forces James Heappey (2020-2024) mengakui pentingnya Indo-Pasifik untuk kemakmuran, keamanan global, dan komitmen terhadap sekutu di kawasan. Heappey juga menyatakan akan memperkuat kerja sama dan dialog pertahanan dengan mitra

utama Inggris kawasan ini. Mitra Inggris yang maksud antara lain India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Pemerintah juga tertarik mengembangkan kemitraan dan kemakmurannya dengan memperkuat sektor pertahanan dan interoperabilitas Inggris (UK Parliament, 2021). Hal ini juga ditambahkan oleh Annabel Goldie (2019-2023) seorang Minister of State for Defence Inggris yaitu Kementerian Pertahanan Inggris juga berencana untuk membangun kehadiran maritim yang gigih di Indo-Pasifik. Hal ini juga merupakan untuk mendukung kemiringan strategis ke arah Indo-Pasifik melalui *Integrated Review 2021* (UK Parliament, 2021).

Kemiringan Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik di pemerintahan Partai Konservatif ini berfluktuasi (Breslin & Burnham, 2023, pp. 407-408). Partai di Inggris sendiri terdiri dari Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Partai Demokrat Liberal. Dikatakan fluktuasi karena sebelumnya di masa pemerintahan konservatif Inggris memiliki hubungan dekat bersama Tiongkok dan pernah mengalami era keemasan di masa koalisi antara Partai Konservatif dengan Partai Liberal Demokrat hingga 2016, tepatnya era pemerintahan David Cameron (2010-2016). Kemudian hubungan kedua negara tersebut didinginkan di masa pemerintahan May (2016-2019). Pada masa itu Lords International Relations and Defence Committee Simon McDonald mengatakan kebijakan Inggris pada tahun 2010 melihat Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi sedangkan Tiongkok membutuhkan pintu gerbang ke Eropa.

Partai Konservatif atau *Conservative and Unionist Party* telah memimpin pemerintah domestik Inggris sejak tahun 2010. Inilah yang menjadikan secara gaya

pandang pemerintah Inggris terhadap Tiongkok sebagai negara kekuatan ekonomi cukup stabil yang akhirnya pada masa pemerintahan Johnson-lah (2019-2022) baru Tiongkok disebut sebagai tantangan sistemik (Woodcock, 2021). Mengutip dari Gardiner (2010), pada laporannya di *The Heritage Foundation*, kebijakan luar negeri Partai Konservatif bertumpu pada empat prinsip berikut. *Pertama*, menekankan hubungan kuat dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain di aliansi Transatlantik. *Kedua*, berkomitmen untuk menjaga kedaulatan nasional Inggris. *Ketiga*, Partai Konsevativ percaya pentingnya memiliki kekuatan militer yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional. *Keempat*, berkomitmen mempromosikan kebebasan dan keadilan di seluruh dunia.

Sejak Pemerintahan Inggris dikuasai oleh Partai Konservatif, hubungan Inggris dan kawasan Indo-Pasifik beberapa tahun terakhir memprioritaskan keterlibatan komersial dan keamanan Inggris di Indo-Pasifik. Mereka memandamgnya sebagai hal yang penting untuk peluang ekonomi masa dan keamanan internasional (Puri, 2024, p. 73).

McDonald pada Breslin dan Burnham (2023, p. 409) menyatakan Tiongkok saat ini dipandang secara perpolitikannya lebih agresif dari yang mereka perhitungkan sebelumnya. Menyeimbangkan masalah keamanan nasional dan kepentingan ekonomi malah mengimplikasikan masalah bagi pemerintah Inggris. Selain persaingan yang diikuti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tingkok, liputan media mengenai peristiwa di Hong Kong, isu Xinjiang, dan asal-usul Virus Covid-19 mengakibatkan hubungannya dengan Tiongkok menurun di parlemen Inggris.

Dalam hal ini Brexit dan perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan Konservatif sangat berpengaruh terhadap berkembannya pandangan Tiongkok sebagai ancaman. Saat Konservatif berkuasa, ada ketidakpuasan yang signifikan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Cameron (2010 – 2016) bersama sekretaris negaranya George Osborne (2015 – 2016) dalam membangun hubungan baru dengan Tiongkok. Penting untuk menekankan kebijakannya agar terlihat sejalan dengan Amerika Serikat terkait Tiongkok. Ini dilakukan untuk mempertahankan investasi masuk dari Amerika Serikat dan menjaga agar perjanjian perdagangan bebas dengan Australia, Selandia Baru, dan Singapura tetap hidup sejak Brexit (Breslin & Burnham, 2023, p. 412; Webb, 2024, p. 1).

Saat Johnson memimpin sebagai perdana menteri, mereka telah berusaha untuk mempertahankan hubungannya bersama Beijing. Hal tersebut dilakukan karena keinginan Inggris untuk melakukan bisnis dengan Tiongkok dan sembari menjauhkan perusahaan Tiongkok dari masalah keamanan nasional yang kritis. Jadi, Johnson bersama dengan Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak (2020 – 2022) menyepakati *Joint Economic and Trade Committee* dan *UK-China Economic and Financial Dialogue* dengan Tiongkok. Sedangkan di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss (2021 – 2022) selain melakukan pemboikotan diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing, juga memerintahkan penarikan hakim Inggris dari Hong Kong atas kekhawatiran tindakan keras terhadap kebebasan. Sekretaris Strategi Bisnis, Energi, dan Industrial Kwasi Kwarteng (2021-2022) juga berusaha mengurangi ketertantungan dengan Tiongkok seperti lithium (Courea, 2022).

Pada tahun 2022, Liz Truss menggantikan Boris Johnson sebagai pemimpin Partai Konservatif serta Perdana Menteri Inggris. Truss berjanji menetapkan Tiongkok sebagai ancaman akut pada keamanan nasionalnya, tetapi janji tersebut belum sempat ditepati. Kemudian tidak lama setelah itu, Truss turun dari Perdana Menteri dan digantikan Rishi Sunak. Sunak juga berjanji yang sama terhadap Tiongkok yang diikuti ancaman jangka panjang dan menyerukan aliansi baru untuk melawan aktivitas Tiongkok. Namun, Sunak juga menekankan perlunya berkerja sama dengan Tiongkok dalam beberapa isu misalnya untuk menjaga keamanan ekonomi sembari tetap menganggapnya sebagai sebuah tantangan (Allegretti & Ni, 2022; Prime Minister's Office , 2022; Breslin & Burnham, 2023, p. 413).

Pada sebuah adu argumen antara David J. Maclean dengan Tariq M. Ahmad di web site UK Parliament (2021). Maclean menanyakan kepada Ahmad selaku Minister of State for the Middle East, North Africa, South Asia, Commonwealth and United Nations yaitu mengenai laporan tentang spionase, ancaman terhadap Taiwan, dan kasus hak asasi manusia terhadap Uighur, Tiongkok oleh Pemerintah Tiongkok. Namun, Pemerintah Inggris tetap menyebutnya sebagai mitra strategis. Ahmad meresponnya nilai-nilai kepentingan Inggris. Sebagai sesama dua pemimpin global dengan kursi tetap di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hal yang tepat untuk melakukan hubungan kuat dan konstruktif di banyak bidang, dan untuk sementara Pemerintah Inggris tidak khawatir. Pemerintah Inggris sementara ini akan selalu melindungi kepentingan nasionalnya dan memastikan Tiongkok memenuhi komitmen dan perjanjiannya di tingkat internasional (UK Parliament, 2021).

Walaupun pandangan terhadap Tiongkok memburuk, namun pandangan pemangku kepentingan Inggris tertarik pada kawasan Indo-Pasifik. Menurut Menteri Negara untuk Urusan Asia di bawah naungan Kantor Luar Negeri, Persemaikan, dan Pembangunan Inggris Nigel Adams (2020-2021), menyatakan bahwa keterlibatan Inggris yang lebih dalam dengan Indo-Pasifik akan menjadi penting di sektor ekonomi, keamanan, dan nilai-nilai Inggris. Kunjungan Menteri Luar Negeri ke negara-negara di Asia pada tahun 2020-an memajukan kolaborasi di seluruh sektor penting bersama Korea Selatan dan Vietnam. Inggris melakukan permohonan status Mitra Dialog ASEAN dan akses Perjanjian Komprehensif dan progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik akan memperdalam hubungan politik kedua pihak (UK Parliament, 2021).

Pada pidatonya di Guildhall London pada tahun 2022 di London, Sunak menyatakan ketertarikannya memanfaatkan peluang besar yang ditawarkan di Indo-Pasifik dengan membangun kemitraan yang mendalam dan jangka panjang. Menurutnya pada tahun 2050-an, Indo-Pasifik akan mengasilkan lebih dari setengah pertumbuhan global. Kehadiran Inggris di dalam *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) dan kemitraan AUKUS adalah bentuk untuk mendukung keamanan dan kemakmuran baik kawasan Indo-Pasifik maupun dengan kawasan Eropa (Prime Minister's Office , 2022). Melakukan kemitraan keamanan bersama Australia dan Amerika Serikat dalam AUKUS adalah wujud nyata dari ambisi Inggris dalam *Integrated Review 2021* untuk memperdalam pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri yang berjalan serta mempromosikan stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik (UK Parliament, 2021).

Jauh berbeda dengan trilateral AUKUS, FPDA hanyalah sebuah pengaturan pertahanan lima negara yang terdiri dari Australia, Malaysia, Selandia Baru, dan Inggris untuk saling berkonsultasi jika terjadi serangan terhadap Malaysia dan Singapura (Five Power Defence Arrangements, n.d.). Namun di sisi lain, Pemerintah Inggris tidak melupakan kawasan Euro-Atlantik begitu saja, bahkan menurut mereka keamanan di Euro-Atlantik dengan Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan (UK Parliament, 2022).

Setelah melakukan politik yang bernuansa bersama Tiongkok, Inggris terlihat telah menyelaraskan diri bersama Amerika Serikat. Menurut peneliti senior di Chatham House Yu Jie pada Courea (2022), Inggris sangat dipengaruhi oleh hubungan khusus, Piagam Atlantik Baru, dan kemitraan AUKUS. Penasihat Kebijakan Luar Negeri Boris Johnson di Downing Street John Bew pada Courea (2022), memandang pendekatan Inggris adalah mendapatkan keuntungan dari hubungan dan keamanan dari Amerika Serikat dan NATO, sembari mencari investasi dari Tiongkok. Tetapi nampaknya, saat ini pendekatan ini makin sulit dilakukan.

Menurut Fitriani dalam wawancaranya (2025) menyatakan bahwa:

“Ya, itu salah satu yang membuat Inggris membuat lebih kelihatan perannya ketika dia diajak oleh Amerika untuk punya framework yaitu AUKUS, dalam menghadapi China. Nah tapi Inggris sendiri sebetulnya berusaha mencari ruang setelah dia keluar dari Brexit dia kan ingin mencari posisi juga gitu lho... Nah kebetulan nih Amerika dan Australia concern dengan China membentuk AUKUS. Nah ini lah yang kemudian oleh Inggris menjadi platform dia untuk hadir di Asia-Pasifik Indo-China ini” (Fitriani, 2025).

Sejak kehadiran Inggris dalam AUKUS, di sini Inggris makin terlihat perannya ketika Inggris bersama Amerika Serikat dalam satu kemitraan. AUKUS ini ditujukan untuk menghadapi Tiongkok. Posisi Inggris sendiri juga diketahui

sedang mencari posisi baru pasca Brexit. Kondisi Tiongkok yang kian mengancam di kawasan serta Australia dan Amerika Serikat yang sedang fokus ancaman Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik ini yang kemudian AUKUS dijadikannya *platform* masuk ke kawasan Indo-Pasiifk ini

Setelah melihat faktor-faktor internal seperti opini publik Inggris mengenai Tiongkok baik secara perekonomian dan/atau politik, pandangan urusan ekonomi atau perdagangan Inggris ke kawasan Indo-Pasifik dan, pandangan melalui media menurut Foyle dan Belle (2010). Serta faktor para pemimpin, dan identitas Inggris menurut Baylis, Smith, dan Owens (2014, p. 337), termasuk partai politik yang mana inilah yang akan mempengaruhi pola kebijakan luar negeri Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik. Menurut Breslin (2023, p. 413), para pemimpin Konservatif dan pemimpin Partai Buruh di masa depan harus melakukan keseimbangan antara memenuhi harapan parlemen dan partai politik mengenai kebijakan Tiongkok untuk meraih kekuasaan di satu sisi, dan berurusan dengan realitas Tiongkok sebagai aktor global.

Anne-Marie Trevelyan sebagai Minister of State for Indo-Pacific Inggris menyatakan bahwa Tiongkok adalah negara besar secara perekonomiannya seperti sumber bantuan, perdagangan, dan investasi penting bagi banyak negara termasuk di Indo-Pasifik. Akan tetapi, di sisi lain Tiongkok juga menimbulkan potensi resiko. Maka dari itu, Inggris memperdalam kerja sama dan peningkatan keselarasan bersama sekutu inti dan mitra yang luas, termasuk untuk menyimbangan, keamanan kolektif, dan menjaga nilai-nilai demokrasi di kawasan untuk menjaga hubungan

dagangnya dengan mitra-mitranya dan menjaga jalur perdagangannya pula (UK Parliament, 2023).

Pada hal lain, penulis juga membandingkan komitmen-komitmen pada dokumen kebijakan Inggris terdahulu terkait kawasan Teluk dan Indo-Pasifik atau Asia-Pasifik baik secara fokus kebijakan, pertahanan dan keamanan, atau ekonomi. Pertama, pada dokumen kebijakan tahun 2008 *The National Security Strategy of the United Kingdom: Security in an interdependent world*. Dokumen kebijakan ini hanya menyatakan akan mempertahankan AL-nya di Samudra Hindia dan Teluk Persia untuk memberikan kontribusi internasional yaitu melindungi jalur laut dan titik sempit dari ancaman terorisme, pembajakan, dan gangguan lainnya yang disponsori negara. Membahas mengenai Tiongkok, Inggris ingin terus mempererat hubungan bilateral. Saat itu, Tiongkok telah disebut London sebagai negara kekuatan ekonomi terbesar keempat. Bahkan London menyatakan tantangan yang dihadapi oleh Inggris tidak akan terselesaikan tanpa keterlibatan Tiongkok (Prime Minister & Command of Her Majesty, 2008, pp. 47, 54).

Kedua, dokumen kebijakan *Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review* tahun 2010. Dalam dokumen kebijakan ini, Inggris menyadari pentingnya penggunaan perantara kapal induk dengan dukungan jet tempur terbaru untuk memproyeksikan kekuatan militer lebih dari 1296 kilometer di darat dan laut, berdasarkan inspirasi dari Amerika Serikat dan Prancis. Inggris berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan berbagai negara, termasuk pengembangan keamanan bilateral dengan negara-negara Teluk Arab. Inggris juga menyatakan membangun dialog politik, keamanan, kerja sama sumber

daya energi, dengan Rusia dan menjadikan mitra utama bersama Tiongkok. Kali ini, Tiongkok menjadi prioritas dalam hubungan diplomatik bilateral. Secara keamanan eksternal, terlihat sebagian besar kebijakan-kebijakan luar negeri Inggris berfokus pada kawasan Asia Tengah termasuk area rawan terorisme seperti Afghanistan, Somalia, dan Yaman. Selain itu, Inggris juga lebih terfokus pada keanggotaannya di dalam NATO dan Uni Eropa (The Prime Minister & Command of Her Majesty, 2010, pp. 22, 51, 60, 67).

Ketiga, berjudul *National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure and Prosperous United Kingdom (NSS and SDSR 2015)*. Di sini, Inggris menyatakan bahwa dirinya adalah negara *Soft Power*. Inggris menyatakan telah memperkuat kemitraan keamanan di Timur Tengah utamanya kawasan Teluk, hubungan yang kuat dan erat bersama kawasan Asia-Pasifik termasuk Tiongkok, dan menjadi negara Barat besar pertama yang menjadi calon anggota pendiri *Asian Infrastructure Investment Bank*. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara lebih dipandang sebagai kekuatan regional yang mengejar keamanan dan didorong kemampuan militer dan ekonomi yang meningkat. Sedangkan kawasan Asia, dipandang pertumbuhan ekonomi dan politik yang diikuti ketegangan Korea Utara (The Prime Minister & Command of Her Majesty, 2015, pp. 13-14, 19).

Inggris menyatakan akan mengangkat Staf Pertahanan Inggris di Timur Tengah, Asia-Pasifik, dan Afrika pada 2016 untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai mitra di kawasan tersebut. Inggris juga ingin memperkuat keterlibatannya dengan ASEAN terkait isu bantuan kemanusiaan, terorisme, dan perdagangan.

Tiongkok dipandang oleh Inggris sebagai mitra yang lebih dalam dan erat untuk mengatasi tantangan global serta akan membentuk dialog keamanan tingkat tinggi dalam isu keamanan. Di sini, Inggris masih sama sekali tidak memandang Tiongkok sebagai ancaman dalam bentuk apapun (The Prime Minister & Command of Her Majesty, 2015, pp. 49, 58-59).

*Keempat, Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy* tahun 2021 (yang seterusnya penulis singkat *Integrated Review 2021*). Inggris menyatakan akan beradaptasi dengan keseimbangan regional dan bekerja sama dengan struktur di kawasan seperti ASEAN dan CPTPP. Kawasan Asia, dipandang sebagai potensi perdagangan Inggris dan pusat persaingan geopolitik dan geoekonomi, mulai dari sengketa teritorial, proliferasi nuklir, isu iklim, kebebasan navigasi, terorisme, bahkan ketegasan internasional Tiongkok dan pentingnya kawasan Indo-Pasifik juga menjadi prioritas Inggris (Command of Her Majesty, 2021, pp. 14, 17, 66).

Berbeda dengan dokumen kebijakan yang sebelum-sebelumnya, pada *Integrated Review 2021* hubungannya bersama Tiongkok secara ekonomi akan terus dikuatkan dan mengamankan investasi dengan Tiongkok. Namun secara keamanan yang diikuti perkembangan modernisasi Tiongkok, Inggris telah mewanti-wanti meningkatnya ketegangan kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi melemahkan kepenting Inggris di kawasan (Command of Her Majesty, 2021, pp. 22, 29).

Pola kebijakan luar negeri Inggris berdasarkan dokumen kebijakan dari tahun 2008, 2010, 2015, dan 2021, Inggris selalu menyerukan dan menargetkan untuk

menjaga stabilitas dan keharmonisan di kawasan yang mereka targetkan. Inggris pada tahun 2015, pertama kali membahas kawasan Asia-Pasifik pada dokumen kebijakan *NSS and SDSR* (2015) sebagai kepentingan dan peluang ekonominya. Kemudian pada *Integrated Review 2021*, istilah ‘Asia-Pasifik’ menghilang dan berubah keseluruhannya menjadi istilah ‘Indo-Pasifik’. Kali ini pada *Integrated Review 2021*, tidak hanya karena faktor ekonomi yang menjadi kepentingan Inggris, namun kompetisi sistemik, geopolitik dan geoekonomi, stabilitas regional, dan keamananlah yang menjadi fokus Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik. Bahkan kata ‘Timur Tengah’ dalam konteksi menjaga keamanan, juga menghilangan pada *Integrated Review 2021*.

Fitriani dalam wawancaranya menambahkan bahwa Inggris memang sedang memperluas pengaruhnya di global, salahnya di kawasan Indo-Pasifik, akan tetapi tidak berarti meninggalkan dan pindah dari kepentingan di kawasan Timur Tengah. Inggris tidak mungkin keluar dari Timur Tengah karena itu adalah wilayah strategis mereka. Lebih tepatnya dikatakan bahwa Inggris memang sejak dulu melakukan pergeseran dari Uni Eropa dan memanfaatkan hubungan baiknya bersama Amerika Serikat (Fitriani, 2025).

#### **4.1.3 Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Inggris ke Indo-Pasifik**

Keanggotaan Inggris di Uni Eropa telah lama dibayang-bayangi oleh keraguan dalam komitmennya dalam Uni Eropa. Sejak tahun 2015, terjadi pergejolakan antara pro dan kontra mengenai penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit. Penarikan salah satu anggota terbesar Uni Eropa memungkinkan akan